

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS PAD
DAN KESERASIAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD Dan
Keserasian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

RISKY AYU FADILAH

NIM : 105721123121

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

“Letakkan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku”
(QS. Al-Baqarah : 152)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu dan bapak, orang yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan ibu dan bapak saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan tolong hidup lebih lama lagi

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunianya.



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Dan Keserasian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Risky Ayu Fadilah

No. Stambuk/NIM : 105721123121

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 23 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Rustan, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPAI.,
CPA ASEAN CPA
NIDN: 0901126503

Pembimbing II

Safri Halidin, S.E.,M.Sc.,
ACC
NIDN: 0911038502

Mengetahui

Ketua Program Studi

Nasrullah, S.E. M.M
NBM: 1151 132





PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Risky Ayu Fadilah, Nim : 105721123121 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0009/SK-Y/61201/091004/2025 M, Tanggal 1 Rabiul Awal 1447 H/25 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rabiul Awal 1447 H

25 Agustus 2025 M

PANITIA UJIAN

| | | |
|---------------|--|--|
| Pengawas Umum | :Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda MT. IPU. (Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| Ketua | :Dr. Edi Jusriadi, S.E. M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| Sekretaris | :Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| Penguji | 1 Dr. Rustan, S.E., m. Si., AK., CA., CPAT CPI., ASEAN CPA 2 Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR, SE., MM 3 Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC 4 Nurlina, S.E., M.M. | (.....) (.....) (.....) (.....) |





PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Risky Ayu Fadilah

Stambuk : 105721123121

Program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Keserasian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,
Risky Ayu Fadilah
NIM: 105721123121

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Masrullah, S.E. M.M
NBM: 1151131

Dr. Eni Jusriadi, S.E.M.M
NBM: 0922027901

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risky Ayu Fadilah
NIM : 105721123121
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Keserasian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



ABSTRAK

RISKY AYU FADILAH.2025. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Keserasian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Skripsi. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Rustan dan Safri Haliding.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan, dokumen-dokumen dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dimulai pada tahun 2022 ke 2024, yakni 13,02% menjadi 14,65% menunjukkan tren membaik, namun masih berada dalam kategori rendah. Peningkatan berkelanjutan harus difokuskan pada penguatan PAD dan efisiensi belanja. Efektivitas PAD menurun secara konsisten setiap tahun, dari 12,5% pada tahun 2022 menjadi 10,3% di tahun 2024, mengindikasikan perlunya evaluasi target PAD dan optimalisasi strategi pemungutan. Rasio Keserasian yang rendah mengindikasikan dominasi belanja operasional.

Kata kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Keserasian

ABSTRACT

RISKY AYU FADILAH.2025. Analysis of Regional Financial Independence, PAD Effectiveness, and Harmony of the Food Crops, Horticulture and Plantation Service of Enrekang Regency. Thesis. Department of Management, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Rustan and Safri Haliding.

This research is a quantitative study with the aim of analyzing the financial performance of the Food Crops, Horticulture, and Plantation Service of Enrekang Regency. This research was conducted at the Food Crops, Horticulture, and Plantation Service of Enrekang Regency. The type of data used in this study is quantitative data in the form of financial reports, documents, and additional information required for the study. Data collection was carried out through documentation. In this study, the data sources used in data collection include secondary data. Based on the results of the data analysis that has been described, it can be concluded that the Regional Financial Independence Ratio (RKKD) starting from 2022 to 2024, namely 13.02% to 14.65% shows an improving trend, but is still in the low category. Continuous improvement must be focused on strengthening PAD and spending efficiency. PAD effectiveness has decreased consistently every year, from 12.5% in 2022 to 10.3% in 2024, indicating the need for evaluation of PAD targets and optimization of collection strategies. A low Harmony Ratio indicates a dominance of operational spending.

Keywords: *Regional Financial Independence, PAD Effectiveness, Harmony*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

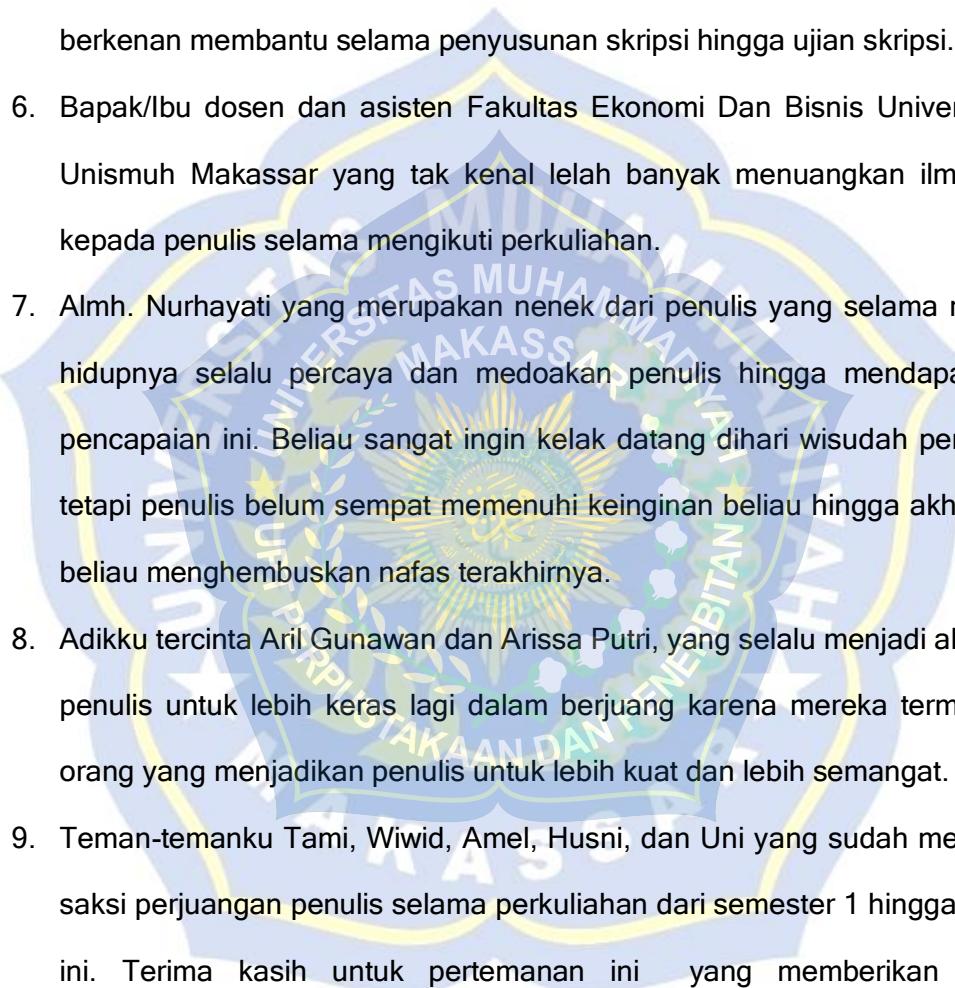
Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula salam dan shalawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Nabi yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami oleh penulis. Namun semua itu dapat dilalui oleh penulis dengan baik berkat bantuan-Nya serta doa dan dorongan dari semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Melalui tulisan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang memberikan kemudahan, kepada penulis hingga sekarang, serta kepada semua pihak yang telah ikut membantu.

Skripsi ini dapat selesai tentunya berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Olehnya itu, izinkan penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, MT, IPU. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 
3. Bapak Nasrullah, S.E., M.M, selaku ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
 4. Bapak Dr. Rustan, SE.,M.Si.,ak.,CA.,CPAI.,CPA.,ASEAN.,CPA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
 5. Bapak Safri Haliding, S.E.,M.Sc.,ACC selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
 6. Bapak/Ibu dosen dan asisten Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Unismuh Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
 7. Almh. Nurhayati yang merupakan nenek dari penulis yang selama masa hidupnya selalu percaya dan medoakan penulis hingga mendapatkan pencapaian ini. Beliau sangat ingin kelak datang dihari wisudah penulis, tetapi penulis belum sempat memenuhi keinginan beliau hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya.
 8. Adikku tercinta Aril Gunawan dan Arissa Putri, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena mereka termasuk orang yang menjadikan penulis untuk lebih kuat dan lebih semangat.
 9. Teman-temanku Tami, Wiwid, Amel, Husni, dan Uni yang sudah menjadi saksi perjuangan penulis selama perkuliahan dari semester 1 hingga saat ini. Terima kasih untuk pertemanan ini yang memberikan rasa kebahagiaan dan pengalaman yang belum pernah penulis rasakan sebelumnya. Terima kasih telah banyak membantu, menemani dan mendukung penulis selama ini dan terima kasih sudah membuktikan bahwa teman kuliah tidak seburuk itu.
 10. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun

terkadang sulit dimengerti, yaitu sang penulis Risky Ayu Fadilah. Seorang anak berusia 22 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketakutan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari rayakan selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

Billahi Fii Sabillil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 6 Juni 2025

Risky Ayu Fadilah



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| A. Kerangka Teori..... | 6 |
| 1. Pengertian Kinerja keuangan | 6 |
| 2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan | 7 |
| 3. Indikator Kinerja Keuangan | 7 |
| 4. Laporan keuangan | 9 |
| 5. Analisis Kinerja Keuangan..... | 11 |
| 6. Rasio Kemandirian Keuangan daerah | 12 |
| 7. Rasio Efektifitas PAD | 13 |
| 8. Rasio Keserasian | 14 |
| B. Tinjauan Empiris..... | 15 |
| C. Kerangka Pikir | 32 |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN..... | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Fokus Penelitian..... | 34 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| 1. Jenis Data | 34 |
| 2. Sumber Data | 35 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Definisi Operasional Variabel | 35 |
| G. Metode Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| A. | Gambaran Umum Objek Penelitian | 38 |
| B. | Hasil Penelitian | 44 |
| C. | Pembahasan | 54 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | | 62 |
| A. | Kesimpulan | 62 |
| B. | Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 63 |
| LAMPIRAN | | 67 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir 43



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah | 19 |
| Tabel 2. 2 Efektivitas keuangan | 20 |
| Tabel 2. 3 Tinjauan Empiris | 21 |
| Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang Tahun 2022 | 45 |
| Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang Tahun 2023..... | 46 |
| Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang Tahun 2024..... | 47 |
| Tabel 4. 4 Rasio Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang | 53 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi pemerintahan merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara atau daerah. Instansi pemerintahan berperan dalam pengelolaan kebijakan, penyelenggaraan layanan publik, serta pelaksanaan tugas administratif dan operasional di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan infrastruktur. Instansi ini dapat berada pada tingkat pusat maupun daerah dan memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, instansi pemerintahan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik, menjaga ketertiban, serta memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan aspek penting di dalam instansi pemerintahan dan mengimplementasikan kebijakan publik dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan, memerlukan evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan anggaran yang dikelola mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan meliputi rendahnya tingkat kemandirian fiskal, kurang optimalnya

pemanfaatan PAD, serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan keserasian antara belanja publik dan belanja operasional. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program prioritas serta mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Instansi ini bertugas merancang kebijakan terkait pertanian, baik dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perkebunan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kantor pertanian berupaya mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (petani), dan menjaga kelestarian lingkungan. Institusi ini menjalankan program seperti pelatihan petani, pengelolaan pupuk bersubsidi, pembangunan irigasi, dan promosi produk lokal. Untuk memperkuat sektor pertanian, kantor ini bekerja sama dengan pemerintah pusat, swasta dan lembaga internasional.

Saat ini pendanaan pemerintahan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat sehingga perlunya upaya peningkatan kemandirian fiskal. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak seimbang dapat memengaruhi keberlanjutan program strategis salah satunya di sektor hortikultura dan perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan menggunakan indikator rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Rofiq & Arza, (2021), mendefinisikan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan sumber-sumber PAD tanpa bergantung secara signifikan pada bantuan dari pihak eksternal, terutama pemerintah pusat. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diketahui melalui rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan daerah yang menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. Semakin besar rasio tersebut, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. Sebaliknya, jika rasionya rendah, berarti daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Pengertian rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) menurut Senapan et al., (2021) yang mengatakan bahwa definisi rasio efektifitas PAD merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output* yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program yang telah disusun dan direncanakan dengan target yang telah diterapkan. Pengertian efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu kegiatan usaha di sektor public. Dengan demikian, suatu kegiatan dianggap efektif apabila kegiatan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran dan telah terlaksana.

Rasio keserasian mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengatur prioritas alokasi anggarannya secara proporsional antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Apabila proporsi anggaran yang digunakan untuk belanja rutin semakin besar, maka porsi dana yang tersedia untuk belanja pembangunan yang berfungsi menyediakan infrastruktur dan fasilitas

ekonomi bagi masyarakat cenderung menjadi lebih kecil (Sriningsih et al., 2021).

Analisis kinerja keuangan merupakan salah satu metode untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan di bidang keuangan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul "**Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Keserasian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Enrekang**" (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) untuk periode tahun 2022 hingga 2024.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang mampu mengoptimalkan sumber daya tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD?
2. Bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang merealisasikan PAD yang direncanakan sesuai target yang ditetapkan?
3. Bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Enrekang memprioritaskan dananya pada Belanja Operasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang mampu mengoptimalkan sumber daya tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
2. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang merealisasikan PAD yang direncanakan sesuai target yang ditetapkan.
4. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Enrekang memprioritaskan dananya pada Belanja Operasional.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Keserasian. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi dan pemikiran yang berguna dalam menilai serta meningkatkan efektivitas kinerja keuangan, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan yang semakin kompetitif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Kinerja keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah . Hal ini dilakukan tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, serta memberikan dukungan dalam penggunaan dana keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Badali et al., 2022). Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menilai kinerja keuangan melalui penghitungan berbagai rasio keuangan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta panduan untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Menurut Setiawan (2021), analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua data angka dari laporan keuangan yang digunakan untuk menilai dan memahami perkembangan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.

Pengukuran kinerja keuangan memiliki peran penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan untuk menunjukkan bagaimana dana publik digunakan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana

dana tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisiensi menunjukkan bahwa dana masyarakat dimanfaatkan untuk menghasilkan output secara optimal, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan publik, sementara aspek ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin (Melmambessy, 2022).

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Septa Soraida, (2022), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam membiayai pelaksanaan program-programnya secara mandiri.
- b. Menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan.
- c. Menganalisis tingkat aktivitas Dinas dalam menggunakan pendapatan untuk membiayai berbagai pengeluaran.
- d. Menilai besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan yang diperoleh.
- e. Mengamati tren pertumbuhan atau perubahan pendapatan dan belanja selama periode waktu tertentu.

3. Indikator Kinerja Keuangan

Setiap organisasi memiliki indikator-indikator kinerja tertentu yang berfungsi untuk menilai atau mengukur tingkat pencapaian kinerjanya. Perbedaan dalam penilaian dan hasil pencapaian kinerja seringkali menimbulkan kebingungan dalam menilai kinerja suatu organisasi secara objektif. Oleh karena itu, keberadaan indikator kinerja sangat penting sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kinerja dapat dikatakan berhasil atau tidak. Menurut Permatasari & Trisnawati, (2022) terdapat indikator kinerja keuangan daerah meliputi;

a. Indikator masukan (inputs)

Indikator masukan mencakup semua hal yang diperlukan agar suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran, baik berupa barang maupun jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan lain-lain.

b. Indikator Proses (process)

Indikator proses adalah ukuran yang menentukan kegiatan dari segi kecepatan, ketepatan, dan tingkat akurasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Contohnya termasuk kepatuhan terhadap peraturan-undangan dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau menyediakan layanan.

c. Indikator keluaran (output)

Indikator keluaran merujuk pada hasil yang diharapkan dapat dicapai langsung dari suatu kegiatan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

Contohnya termasuk jumlah produk atau jasa yang dihasilkan serta presisi dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator hasil (outcome)

Indikator hasil menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan menunjukkan efektivitasnya dalam jangka menengah. Contoh indikator ini antara lain mencakup mutu produk dan layanan yang dihasilkan serta tingkat produktivitas pegawai.

e. Indikator manfaat (Benefit)

Indikator manfaat mengacu pada aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu kegiatan. Contoh penerapannya mencakup tingkat kepuasan masyarakat dan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

f. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Misalnya, peningkatan taraf hidup masyarakat dan bertambahnya pendapatan masyarakat.

4. Laporan keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya menyajikan informasi yang mencerminkan kondisi finansial suatu perusahaan, dan informasi ini dapat digunakan sebagai cerminan dari kinerja keuangannya. Secara umum, jenis-jenis laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Laporan keuangan berfungsi sebagai "alat

evaluasi" terhadap berbagai aktivitas perusahaan, seperti pendanaan, investasi, dan operasional, yang kemudian dianalisis untuk menilai posisi keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Hastiwi et al, (2022), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur yang menggambarkan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi berbagai kalangan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, Ramadhan et al., (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan posisi perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat penting untuk memancarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta waktu dan kepastian dari hasil tersebut.

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi terkait kondisi keuangan perusahaan, yang ditujukan bagi pihak internal maupun eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan ini dapat disusun secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Intinya, laporan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, baik dari dalam maupun luar organisasi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai, khususnya bagi pemilik dan pihak manajemen perusahaan. Secara

lebih spesifik, Syaharman (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menyajikan data mengenai jenis dan nilai aset (harta) yang dimiliki perusahaan pada waktu tertentu.
- b. Menyediakan informasi mengenai jenis dan besarnya kewajiban serta ekuitas perusahaan pada saat ini.
- c. Menyampaikan informasi terkait jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu.
- d. Menginformasikan jenis dan total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
- e. Menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan.
- f. Menyediakan gambaran mengenai kinerja manajemen perusahaan selama periode pelaporan.
- g. Menyampaikan informasi tambahan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan.
- h. Memberikan informasi keuangan lainnya yang relevan bagi pihak yang berkepentingan

Dengan adanya laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dapat dipahami atau diketahui secara lebih lengkap.

5. Analisis Kinerja Keuangan

Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan pengelolaan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah, yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan ini dinilai untuk menentukan apakah pemerintah daerah berhasil melaksanakannya dengan baik atau tidak.

Qosasi & Riharjo (2022) pengukuran kinerja memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kedua, sebagai dasar dalam pengalokasian sumber daya serta mendukung proses pengambilan keputusan. Ketiga, untuk menciptakan akuntabilitas publik serta memperbaiki komunikasi antar lembaga. Kinerja sendiri merupakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh suatu organisasi. Apabila hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan, maka kinerja tersebut dinilai baik. Jika hasilnya melebihi target yang ditetapkan, maka kinerja dapat digolongkan sangat baik. Namun, apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerjanya dianggap kurang memuaskan. Sementara itu, kinerja keuangan merupakan ukuran pencapaian yang didasarkan pada sejumlah indikator keuangan.

6. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan yang mencakup pembangunan, ekonomi, serta pelayanan kepada masyarakat yang bersedia membayar pajak dan retribusi daerah, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator dalam penelitian ini sejalan dengan variabel RKKD, yang diperoleh dari perhitungan antara PAD dan Dana Perimbangan.

Menurut Diggowiseiso & Satrio (2022), rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun peningkatan kemandirian keuangan daerah, yang dilihat dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana perimbangan, dapat meningkatkan IPM. Selain itu, peningkatan PAD dapat memperbesar anggaran belanja daerah untuk membiayai sektor-sektor yang menguntungkan dan memiliki manfaat jangka panjang. Salah satu contohnya adalah pengalokasian dana untuk pembangunan manusia, di mana alokasi tersebut digunakan untuk dimensi pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, perbaikan fasilitas pendidikan, dan bantuan pendidikan lainnya.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) |
|--------------------|-----------------|
| Rendah sekali | 0%-25% |
| Rendah | 25%-50% |
| Sedang | 50%-75% |
| Tinggi | 75%-100% |

Sumber : (Kamaroellah, 2017)

7. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Suatu instansi pemerintah daerah dikatakan efektif dalam menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai setidaknya mencapai angka 1 (satu) atau 100 persen. Sementara itu, tingkat efisiensi yang semakin tinggi mencerminkan peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dayanya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih tepat, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi sendiri menunjukkan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Kinerja keuangan daerah dalam hal pengumpulan pendapatan dianggap efisien apabila rasio yang diperoleh berada di bawah angka 1 (satu) atau kurang dari 100 persen (Melmambessy, 2022).

Tabel 2. 2 Efektivitas keuangan

| Kemampuan Keuangan | Rasio Efektivitas (%) |
|---------------------------|------------------------------|
| Sangat efektif | >100 |
| Efektif | 100 |
| Cukup Efektif | 90-99 |
| Kurang Efektif | 75-89 |
| Tidak Efektif | <75 |

Sumber: (Syaifanur & Saleh, 2022)

8. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana instansi pemerintah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal antara belanja operasional dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional, maka persentase belanja modal yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi cenderung semakin kecil.

Rasio belanja operasi daerah menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam suatu tahun atau berulang. Pada umumnya pos belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang pendapatannya masih rendah (Endang Purwanti, 2021)

Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang pasti mengenai besaran ideal Rasio Belanja Operasi maupun Belanja Modal terhadap APBD, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan

pembangunan serta besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan. Kendati demikian, di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah daerah masih memegang peranan penting dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, proporsi belanja pembangunan yang masih tergolong rendah perlu ditingkatkan agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang ada.

B. Tinjauan Empiris

Pada bagian ini, peneliti telah mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terkait kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya digunakan sebagai dasar pendukung, baik dalam memperoleh teori maupun poin-poin penting. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 3
Tinjauan Empiris

| No | Nama (Tahun) | Judul | Alat Analisis | Hasil |
|----|-------------------|--|---------------|--|
| 1 | Amu et al, (2023) | Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan | Kuantitatif | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan |

| | | |
|--|--|---|
| | Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo | Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo. Lokasi penelitian berada di Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan pendekatan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD Kota Gorontalo pada periode 2013–2018 mencapai 82%, yang dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada periode 2019–2021 mencapai 100% dan termasuk dalam kategori efektif. Sementara itu, Rasio |
|--|--|---|

| | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|---|
| | | | | Efisiensi PAD selama periode yang diteliti berada pada angka 99%, yang menandakan tingkat efisiensi yang rendah. Adapun Rasio Pertumbuhan PAD Kota Gorontalo pada tahun 2013–2018 sebesar 15% dan meningkat sedikit menjadi 16% pada tahun 2018–2021, namun masih tergolong dalam kategori pertumbuhan yang rendah. |
| 2 | Akib et al (2024) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara | Kuantitatif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara melalui |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, serta Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data secara deskriptif untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun anggaran 2018– 2022, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara masih berada pada tingkat yang sangat rendah dan menunjukkan pola</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>hubungan yang bersifat instruktif. Rasio Efektivitas PAD mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah tergolong sangat efektif. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dikategorikan cukup efisien. Sementara itu, Rasio Keserasian menunjukkan bahwa belanja operasional lebih mendominasi dibandingkan belanja modal. Adapun Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah memperlihatkan bahwa pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasional,</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------|--|
| | | | | dan belanja modal cenderung mengalami fluktuasi selama periode yang diteliti. |
| 3 | Putri & Munandar, (2021) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020 | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. |
| 4 | Awani & Hariani, (2021) | Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Kualitatif dan Kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemandirian daerah di seluruh kabupaten yang berada di Pulau Sumatera selama periode 2015–2018 tergolong rendah, dengan rata-rata yield hanya mencapai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah masih tergolong kurang optimal. Sementara itu, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dinilai cukup efektif, karena rata- |

| | | | | |
|---|----------------------|---|-------------|--|
| | | | | rata capaian PAD berada di atas 90%. Namun, laju pertumbuhan PAD selama periode tersebut menunjukkan pola yang tidak stabil atau mengalami fluktuasi. |
| 5 | Irwan Moridu, (2021) | Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai | Kuantitatif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas PAD. Berdasarkan hasil |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | analisis, selama periode 2015–2018, tingkat efisiensi PAD di Kabupaten Banggai tergolong sangat efisien, dengan persentase masing-masing sebesar 0,43% pada tahun 2015, 0,37% pada 2016, 0,49% pada 2017, dan 0,35% pada 2018. Sementara itu, efektivitas PAD pada tahun 2015 berada dalam kategori sangat efektif dengan nilai 105,20%, kemudian menurun ke kategori cukup efektif pada tahun 2016 dan 2017 dengan nilai masing-masing 96,61% dan 95,95%. Namun, pada tahun 2018 efektivitas |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | menurun lebih lanjut ke kategori kurang efektif dengan capaian sebesar 77,31%. |
| 6 | Amal dan Wibowo, (2022) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 | Kualitatif dan Kuantitatif | Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Analisis keuangan digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan berdasarkan data laporan keuangan, serta untuk memproyeksikan kinerja keuangan di masa mendatang. Provinsi DKI Jakarta juga diperkirakan turut merasakan dampak |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>dari pandemi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2019 hingga 2020. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menganalisis beberapa rasio keuangan, antara lain rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, pertumbuhan, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | secara umum berhasil mempertahankan beberapa rasio utama, seperti rasio kemandirian, efektivitas, dan DSCR. Namun, rasio aktivitas dan pertumbuhan mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19. |
| 7 | Karlina & Handayani, (2020) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015 | Kualitaatif dan Kuantitatif | Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan Kurang baik dalam varian pendapatan. Hal ini dibuktikan (a) varians pendapatan daerah rata-rata di |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>bawah 100%, (b) rasio keuangan daerah dilihat derajat desentralisasi menunjukkan rata-rata 53,54%, rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata 176,05%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata positif, 2) kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan angaran belanja daerah Kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) varians belanja daerah rata-rata di bawah 100%, (b) keserasian belanja daerah dilihat dari rata-rata belanja</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | modal 24,98% dan rata-rata belanja operasional 74,98%, (c) efisiensi belanja daerah rata-rata dibawah 100% yakni 82,54%, (b) pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 9,57%, (d) efisiensi belanja |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%. |
| 8 | (Marselina & Herianti, 2022) | Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu | Kuantitatif | <p>Kemandirian keuangan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel berupa laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu pada periode 2017</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>hingga 2021. Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata rasio tingkat kemandirian di Kota dan Kabupaten Provinsi Bengkulu selama tahun 2017–2021 adalah sebesar 6,88%, yang termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Selain itu, rata-rata kapasitas keuangan daerah di wilayah tersebut mencapai 100,48%, yang menunjukkan kapasitas keuangan sangat baik karena berada di atas ambang 50%. Dari sisi</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|---|
| | | | | efektivitas, rasio rata-rata selama periode tersebut mencapai 87,91%, yang menunjukkan tingkat efektivitas cukup baik dengan kategori cukup efektif (interval 80-90%). Namun, rasio efisiensi selama tahun 2017–2021 tercatat sangat tinggi, yaitu sebesar 1.841,87%, yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah belum efisien karena biaya belanja daerah melebihi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). |
| 9 | Ratu et al., (2023) | Analisis Komparasi Kinerja | Kuantitatif | Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Dan Non Kepulauan Di Sulawesi Utara | | kinerja keuangan Pemerintah Daerah antara Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan di Sulawesi Utara dengan melihat rasio kemandirian, ketergantungan, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan memanfaatkan data sekunder. Populasi penelitian mencakup 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 6 Kabupaten/Kota dengan metode |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Simple Random Sampling, meliputi 30 laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan uji deskriptif dan uji beda rata-rata dengan teknik Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan antara Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan dalam hal rasio kemandirian, efisiensi, dan aktivitas. Namun, untuk rasio ketergantungan dan efektivitas, tidak</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|------------------|--|-------------|---|
| | | | | ditemukan perbedaan yang signifikan. |
| 10 | Riana, (2021) | Evaluasi Kinerja Manajemen dan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014- 2018 | Kuantitatif | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan pada periode 2014-2018 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan tahun 2014-2018 serta data pendukung lain dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat. Teknik analisis |

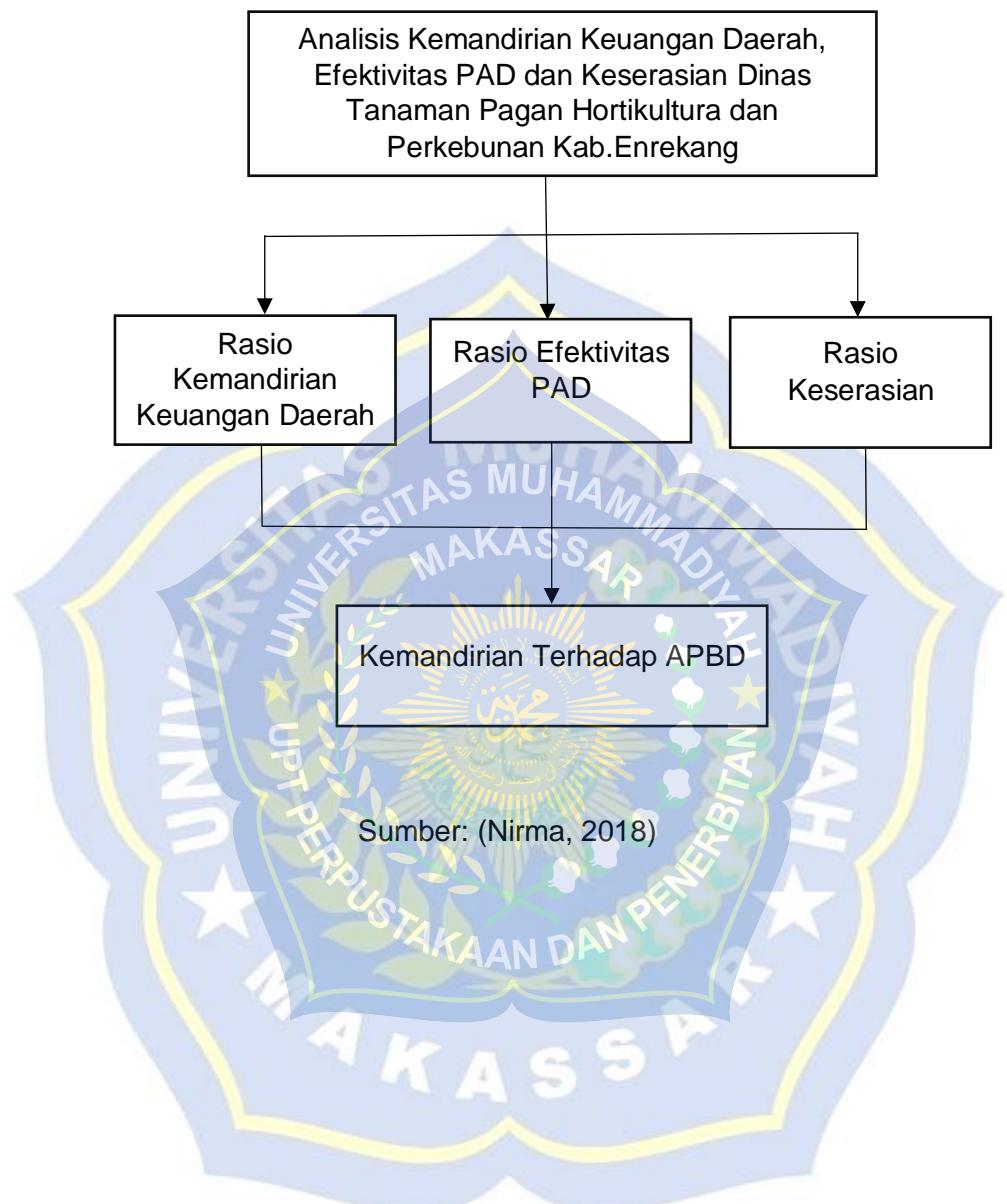
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | dilakukan dengan menghitung dan mengkaji berbagai rasio keuangan terkait pelaksanaan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan selama tahun anggaran 2014-2018 tergolong cukup baik. Rata-rata rasio kemandirian tercatat sebesar 39,06%, yang termasuk dalam pola hubungan konsultatif, rasio efisiensi rata-rata 92,38% yang masuk kategori efektif, dan rasio perolehan rata-rata sebesar 74,87% yang dikategorikan efisien. |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Selain itu, rasio rata-rata belanja operasi mencapai 79,62%, sedangkan belanja modal sebesar 19,43%, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan pengeluaran operasional dibandingkan investasi modal. Rasio pertumbuhan keuangan selama periode tersebut menunjukkan fluktuasi.</p> |
|--|--|--|--|---|

C. Kerangka Pikir

Analisis kinerja keuangan merupakan proses evaluasi untuk menilai sejauh mana kemajuan pencapaian dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan di bidang keuangan selama periode tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan.

Gambar 3. 1
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan keuangan dinas, baik itu aspek kemandirian maupun kepatuhannya terhadap aturan.

B. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini untuk menilai kemampuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun efisiensi dalam penggunaan anggaran.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang beralamat di jalan poros Pinang - Rappang Km 3 Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa laporan keuangan, dokumen-dokumen, dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk penelitian ini. Sementara itu, data kualitatif terdiri dari penjelasan

yang diberikan oleh pejabat berwenang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melihat informasi berupa data, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penulisan ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen atau catatan yang telah tersedia. Selain itu, metode wawancara juga diterapkan sebagai pelengkap apabila informasi dari dokumentasi dirasa belum cukup jelas.

F. Definisi Operasional Variabel

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana instansi pemerintah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Penelitian ini mengukur variabel kinerja keuangan dengan 3 bagian yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

2. Rasio efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Rasio keseraian

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis deskriptif memberikan gambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini menggunakan tipe hubungan korelasional, yang bertujuan untuk menemukan fakta mengenai kemampuan Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian dalam mengoptimalkan sumber daya tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Hasil penelitian ini menekankan pada pemberian gambaran objektif mengenai sejauh mana dinas tersebut mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan mengelola anggarannya secara optimal.

Penelitian ini mengukur variabel kinerja keuangan dengan 3 bagian yaitu:

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

5. Rasio efektivitas PAD

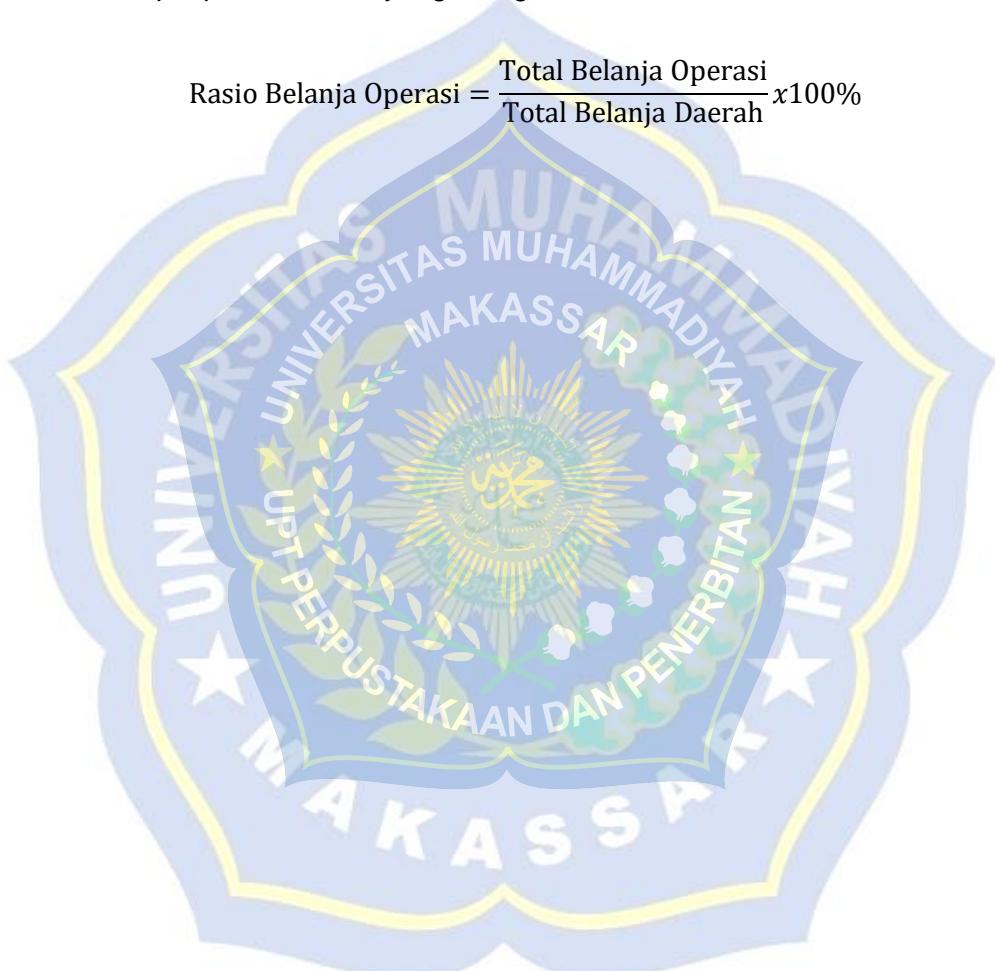
Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

6. Rasio keseraian

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Enrekang, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian, khususnya dalam tanaman pangan. Tanaman pangan utama yang dibudidayakan di daerah ini meliputi padi, jagung, dan umbi-umbian. Padi menjadi komoditas pokok yang sangat penting bagi masyarakat, sementara jagung dan umbi-umbian seperti singkong dan ketela juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Dengan kondisi tanah yang subur dan iklim yang mendukung, petani di Kabupaten Enrekang dapat memproduksi hasil pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.

Di samping tanaman pangan, sektor hortikultura di Kabupaten Enrekang juga berkembang pesat. Berbagai jenis sayuran, seperti cabai, tomat, dan sayuran hijau, serta buah-buahan seperti pisang, mangga, dan jeruk, banyak dibudidayakan oleh petani. Tanaman hortikultura ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke daerah lain, sehingga memberikan peluang tambahan bagi pendapatan petani. Upaya diversifikasi tanaman hortikultura ini didorong oleh permintaan pasar yang terus meningkat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk kesehatan.

Sektor perkebunan di Enrekang juga memiliki peranan penting, terutama dalam produksi kopi yang dikenal berkualitas tinggi. Selain kopi, tanaman rempah seperti cengkeh dan kakao juga menjadi komoditas unggulan

yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada petani, serta pengenalan teknologi pertanian modern. Meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan serangan hama tetap ada, pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dan diversifikasi tanaman menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Enrekang.

Pendirian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Kabupaten Enrekang didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah tersebut. Dengan potensi alam yang melimpah, termasuk tanah subur dan iklim yang mendukung, Kabupaten Enrekang memiliki peluang besar untuk mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dinas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta mendukung perekonomian lokal.

Pendirian dinas ini juga merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh petani, seperti perubahan iklim, serangan hama, dan akses terbatas terhadap teknologi modern. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berperan penting dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, dan informasi yang diperlukan oleh petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan adanya dukungan dari dinas ini, diharapkan petani dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat petani. Melalui dinas ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dinas ini juga berperan dalam memfasilitasi akses petani terhadap pasar, sumber daya, dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Enrekang. Dengan demikian, pendirian dinas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang.

1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang mempunyai visi dan misi yang merupakan pemandu arah, guna menciptakan persatuan dan kesatuan gerak bersama bagi seluruh jajaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, dalam pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi.

a. Visi

1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang
2. Peningkatan kualitas hasil dan daya saing produk pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan unggul daerah.

3. Pemenuhan prasarana dan saran pertanian dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

b. Misi

1. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditi utama tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan.
2. Penurunan Tingkat kehilangan hasil saat panen.
3. Penurunan persentase serangan Organisasi Pengganggu Tanaman (OTP).
4. Peningkatan penganggu benih bermutu dan bersertifikat.
5. Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani
6. Ketersediaan peralatan dan mesin pertanian serta ketersediaan pupuk bagi petani.
7. Peningkatan profesionalisme kelembagaan tani dan pendukung usaha tani.
8. Efektivitas usaha agribisnis kelompok tani.
9. Fasilitas aspek permodalan bagi petani dan pelaku usaha pertanian.
10. Penguatan kelembagaan pertanian, peningkatan kapasitas dan kompetensi ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. Stuktur organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 84 Tahun 2023, susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Enrekang terdiri atas:

- 
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian, yang membawahi:
 - Seksi Lahan Irrigasi dan Pembiayaan
 - Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
 - Seksi Penyuluhan
 4. Bidang Tanaman Pangan, yang membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 5. Bidang Hortikultura, yang membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
 - Seksi Produksi Tanaman Hortikultura
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura
 6. Bidang Perkebunan, yang membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 84 Tahun 2023, Tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.

Tugas Pokok

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Enrekang memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Tugas ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi di bidang terkait.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Analisis Kinerja Keuangan Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses penelitian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2022-2024. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, adapun analisis keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Enrekang disajikan pada uraian berikut.

TABEL 4.1

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022**

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi | Realisasi Tahun 2021 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 125,000,000.00 | Rp 157,300,000.00 | Rp 154,800,000.00 |
| B | Belanja Operasi | Rp 22,518,435,672.00 | Rp 20,531,842,899.00 | Rp 26,509,173,238.00 |
| | 1. Belanja pegawai | Rp 10,090,944,291.00 | Rp 10,067,144,291.00 | Rp 9,755,181,196.00 |
| | 2. Belanja barang dan jasa | Rp 4,717,387,314.00 | Rp 4,578,906,841.00 | Rp 9,608,134,720.00 |
| | 3. Belanja pemeliharaan | Rp 75,000,000.00 | Rp 75,000,000.00 | Rp 89,400,000.00 |
| | 4. Belanja Perjalanan Dinas | Rp 2,392,907,604.00 | Rp 2,392,052,263.00 | Rp 2,306,306,239.00 |
| | 5. Belanja hibah | Rp 7,710,104,067.00 | Rp 5,885,791,767.00 | Rp 7,145,857,322.00 |
| C | Belanja modal | Rp 69,818,004.00 | Rp 69,818,004.00 | Rp 1,709,544,991.00 |
| D | Jumlah belanja | Rp 22,588,253,676.00 | Rp 20,601,660,903.00 | Rp 28,218,718,229.00 |
| E | Surplus/Defisit | Rp - 22,463,253,676.00 | Rp - 20,444,360,903.00 | Rp -28,063,918,229.00 |

*Sumber 2024: Keuangan Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Enrekang*

TABEL 4.2

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023**

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2023 | Realisasi | Realisasi Tahun 2022 |
|----|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 130,000,000.00 | Rp 152,950,000.00 | Rp 157,300,000.00 |
| B | Belanja operasional | Rp 55,005,300,191.00 | Rp 44,082,151,484.00 | Rp 20,531,842,899.00 |
| | 1. Belanja pegawai | Rp 9,963,847,367.00 | Rp 9,893,891,131.00 | Rp 10,067,144,291.00 |
| | 2. Belanja barang dan jasa | Rp 11,580,285,624.00 | Rp 10,464,629,753.00 | Rp 4,578,906,841.00 |
| | 3. Belanja pemeliharaan | Rp 100,250,000.00 | Rp 99,115,000.00 | Rp 75,000,000.00 |
| | 4. Belanja Perjalanan Dinas | Rp 6,087,921,224.00 | Rp 5,656,929,838.00 | Rp 2,392,052,263.00 |
| | 5. Belanja hibah | Rp 33,461,167,200.00 | Rp 23,723,630,600.00 | Rp 5,885,791,767.00 |
| C | Belanja modal | Rp 7,094,400,000.00 | Rp 5,629,567,600.00 | Rp 69,818,004.00 |
| D | Jumlah belanja | Rp 62,099,700,191.00 | Rp 49,711,719,084.00 | Rp 20,601,660,903.00 |
| E | Surplus/Defisit | Rp - 61,969,700,191.00 | Rp - 49,558,769,084.00 | Rp -20,444,360,903.00 |

*Sumber 2024: Keuangan Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Enrekang*

TABEL 4.3

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024**

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2024 | Realisasi | Realisasi Tahun 2023 |
|----|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 161,200,000.00 | Rp 167,350,000.00 | Rp 152,950,000.00 |
| B | Belanja operasional | Rp 54,167,648,549.00 | Rp 39,408,160,880.00 | Rp 44,082,151,484.00 |
| | 1. Belanja pegawai | Rp 11,434,558,019.00 | Rp 11,204,294,837.00 | Rp 9,893,891,131.00 |
| | 2. Belanja barang dan jasa | Rp 8,419,914,630.00 | Rp 5,356,154,735.00 | Rp 10,464,629,753.00 |
| | 3. Belanja pemeliharaan | Rp 78,390,000.00 | Rp 54,118,970.00 | Rp 99,115,000.00 |
| | 4. Belanja Perjalanan Dinas | Rp 4,118,626,030.00 | Rp 2,481,975,706.00 | Rp 5,656,929,838.00 |
| | 5. Belanja hibah | Rp 34,313,175,900.00 | Rp 22,847,711,308.00 | Rp 23,723,630,600.00 |
| C | Belanja modal | Rp 450,000,000.00 | Rp 0.00 | Rp 5,629,567,600.00 |
| D | Jumlah belanja | Rp 54,617,648,549.00 | Rp 39,408,160,880.00 | Rp 49,711,719,084.00 |
| E | Surplus/Defisit | Rp - 54,456,448,549.00 | Rp - 39,240,810,880.00 | Rp -49,558,769,084.00 |

Sumber 2024: Keuangan Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

Analisis kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini merupakan suatu proses

penilaian terhadap tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2022-2024. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang pada penelitian ini meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut, nantinya dapat diketahui kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Hasil dari analisis rasio tersebut adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah.

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2022 dilihat dibawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{125000000}{96000000} \times 100\%$$

$$= 13,02\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa daerah belum mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta kontribusi sebagai pendapatan sebesar 13,02%.

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2023 dilihat dibawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{130000000}{98000000} \times 100\% \\ = 13,26\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan rasio kemandirian daerah pada tahun 2022, menunjukkan jika daerah juga belum mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta kontribusi karena masuk dalam kategori rendah sekali, yaitu berada pada rentang 0%-25%

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2024 dilihat dibawah ini :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{161200000}{110000000} \times 100\% \\ = 14,65\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sedikit peningkatan, namun daerah masih belum mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta kontribusi karena masuk dalam kategori rendah sekali, yaitu berada pada rentang 0%-25%.

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dimulai pada

tahun 2022 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang sebesar 13,02% dan tahun 2023 sebesar 13,26% hingga sebesar 14,65% ditahun 2024.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Anggaran Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran PAD}}$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas semakin baik kinerja keuangan daerah.

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2022 dilihat di bawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{157300000 \times 100\%}{125000000} \\ &= 12,5\%\end{aligned}$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2022, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 12,5% masih berada pada interval dibawah 75% yang berarti bahwa tidak efektif.

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2023 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{152950000 \times 100\%}{130000000} \\ &= 11,7\%\end{aligned}$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 11,7% masih berada pada interval dibawah 75% yang berarti bahwa tidak efektif.

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2024 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{167350000}{161200000} \times 100\% \\ &= 10,3\%\end{aligned}$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2024 juga lebih menurun lagi dari tahun 2023, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 10,3% masih berada pada interval dibawah 75% yang berarti bahwa tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dimulai pada tahun 2022 Rasio Efektivitas PAD pada Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang sebesar 12,5%, tahun 2023 sebesar 11,7%, dan sebesar 10,3% di tahun 2024.

3. Rasio Keserasian Belanja Operasional

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belaja Operasi dan Belaja Modal secara optimal.

- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2022 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned}\text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{20531842899}{20601660903} \times 100\% \\ &= 0,9\%\end{aligned}$$

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,9%, hal ini tergolong masih rendah dimana rasio belanja operasional belum mendominasi dari total belanja daerah.

- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2023 dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{44082151484}{49711719084} \times 100\% \\ &= 0,8\%\end{aligned}$$

Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,8%, hal tersebut tergolong masih rendah dimana rasio belanja operasional belum mendominasi belanja daerah, sehingga total belanja daerah yang cukup besar dapat menyokong pembangunan daerah.

- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2024 dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{39408160880}{39408160880} \times 100\% \\ &= 1\%\end{aligned}$$

Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2024 yaitu sebesar 1%, hal ini tergolong stabil dimana rasio belanja operasional sama dengan total belanja daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 20.531.842.899 dimana Rasio mengalami peningkatan pada Tahun 2023 Rp 44.082.151.484, akan tetapi pada Tahun 2024 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp 39.408.160.880 hal tersebut membuktikan bahwa Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang telah memprioritaskan untuk belanja operasi dan belanja modal, namun tetap mempertimbangkan pendapatan daerah yang ada.

Tabel 4.4 Rasio Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | RKKD | 13,02% | 13,26% | 14,65% |
| 2 | Efektivitas PAD | 12,5% | 11,7% | 10,3% |
| 3 | Keserasian | 0,9% | 0,8% | 1% |

Sumber: Hasil analisis keuangan

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mulai dari 13,02%, 13,26%; dan 14,65%. Sedangkan dengan kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sebesar 12,5%, 11,7%, dan 10,3%. Dan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang sebesar 0,9% ditahun 2022, ditahun 2023 sebesar 0,8% dan pada tahun 2024 sebesar 1%

C. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dimulai pada tahun 2022 terjadi peningkatan RKKD secara bertahap dari tahun 2022 ke 2024, yakni dari 13,02% menjadi 14,65%. Meskipun

peningkatannya relatif moderat, tren ini menunjukkan arah positif terhadap upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kenaikan ini dapat diartikan sebagai hasil dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi dalam belanja daerah, atau adanya sumber pendapatan baru yang dikelola daerah sendiri. Namun, meskipun terdapat peningkatan, angka RKKD masih tergolong rendah, karena umumnya daerah dikategorikan mandiri apabila rasio melebihi 50%. Oleh karena itu, Dinas Pangan dan Hortikultura masih memiliki ruang besar untuk memperkuat basis fiskal daerah, misalnya melalui kerja sama agribisnis, pemanfaatan aset daerah, atau pemberdayaan petani hortikultura yang berdampak pada peningkatan PAD secara tidak langsung.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahannya secara mandiri tanpa bergantung secara dominan pada dana transfer dari pusat. Dalam konteks Kabupaten Enrekang, RKKD yang meningkat dari 13,02% pada tahun 2022 menjadi 14,65% pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbaikan, meskipun tingkat kemandirian ini masih tergolong rendah. Menurut Wulandari et al (2023), daerah dikatakan memiliki kemandirian fiskal yang tinggi apabila RKKD berada di atas 50%. Artinya, Kabupaten Enrekang masih sangat bergantung pada transfer dana pusat dan provinsi.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Akbar (2024) yang menemukan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada fase instruktif, yaitu pengaruh pusat terhadap keuangan daerah masih sangat kuat. Ketergantungan ini menjadi tantangan bagi

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam mengembangkan program yang bersifat lokal dan berkelanjutan, mengingat fleksibilitas anggaran yang terbatas dapat membatasi ruang inovasi dan responsifitas terhadap kebutuhan riil petani.

Rendahnya RKKD juga dapat diasosiasikan dengan lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi sumber utama dalam penghitungan rasio tersebut. PAD yang belum optimal mencerminkan bahwa potensi sumber-sumber pendapatan, khususnya yang berbasis agribisnis dan jasa hortikultura, belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Nilai $>100\%$ menunjukkan efektivitas tinggi, sedangkan nilai $<100\%$ menandakan realisasi di bawah target. Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio efektivitas PAD justru mengalami penurunan setiap tahun, dari 12,5% pada tahun 2022 menjadi 10,3% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PAD atau pencapaian terhadap target yang ditetapkan mengalami penurunan efektivitas. Ada dua penyebab utama, yaitu penetapan target PAD yang terlalu tinggi, tidak sebanding dengan potensi yang ada dan kemampuan pemungutan atau pengelolaan PAD yang melemah, akibat lemahnya pengawasan, sistem penarikan, atau kesadaran wajib pajak. Implikasinya terhadap Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan cukup signifikan, karena penurunan efektivitas PAD dapat mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program-program pengembangan pertanian hortikultura. Jika PAD sebagai indikator utama kemandirian melemah, maka anggaran dinas menjadi lebih bergantung pada transfer dari pusat.

Selain RKKD, efektivitas PAD juga menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Data menunjukkan penurunan efektivitas PAD dari 12,5% pada tahun 2022 menjadi 10,3% di tahun 2024. Efektivitas PAD yang menurun menandakan adanya kesenjangan antara target dan realisasi PAD, yang dapat disebabkan oleh overestimasi dalam perencanaan, lemahnya sistem pemungutan, atau menurunnya daya saing sektor ekonomi daerah. Menurut Adinda (2024), penurunan efektivitas PAD mencerminkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam merumuskan target yang realistik dan menjalankan fungsi intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Lebih lanjut, penurunan efektivitas PAD ini berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi belanja pembangunan, termasuk sektor pertanian dan hortikultura yang menjadi fokus pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Hal ini dikuatkan oleh studi Hidayat (2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan belanja modal daerah, yang berarti semakin tinggi efektivitas PAD, semakin besar potensi belanja modal untuk kegiatan produktif.

Dari perspektif manajemen keuangan daerah, efektivitas PAD yang rendah juga menurunkan daya tawar daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Hal ini menyebabkan strategi pembangunan yang bersifat infrastruktur jangka Panjang seperti pengembangan jaringan irigasi hortikultura atau penyediaan alat pascapanen terhambat karena minimnya dukungan pembiayaan internal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam tata kelola PAD, terutama melalui pe

mutakhirkan data objek dan subjek pajak, integrasi digitalisasi layanan, serta penguatan kapasitas SDM pengelola PAD.

3. Rasio keserasian

Rasio keserasian biasanya digunakan untuk melihat keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan (modal). Dalam konteks ini, nilai keserasian mengindikasikan proporsi belanja pembangunan terhadap total belanja. Berdasarkan data hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai rasio keserasian selama tiga tahun relatif rendah, tahun 2022 hanya 0,9%, tahun 2023 turun menjadi 0,8%, dan tahun 2024 menjadi 1,0%. Nilai tersebut berada di bawah angka ideal yang seharusnya mendekati atau melebihi 1,5–2,0 jika pemerintah serius meningkatkan belanja pembangunan. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa belanja daerah lebih banyak terserap untuk kegiatan rutin (belanja pegawai dan operasional) dibandingkan belanja modal atau pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan dua implikasi besar, yaitu Dinas Pangan dan Hortikultura memiliki keterbatasan dalam mengembangkan program pembangunan fisik seperti penyediaan alat pertanian, pembangunan

gudang penyimpanan, irigasi teknis, dan pusat distribusi hasil hortikultura serta ketimpangan tersebut juga menghambat inovasi dan program strategis berbasis infrastruktur jangka panjang yang diperlukan dalam pembangunan pertanian modern dan berkelanjutan.

Di sisi lain, rasio keserasian yang menunjukkan perbandingan belanja pembangunan terhadap total belanja daerah juga menunjukkan angka yang relatif stagnan dan rendah, yakni hanya sekitar 0,8% hingga 1,0% sepanjang periode 2022–2024. Angka ini jauh dari ideal, karena menurut Kementerian Dalam Negeri, porsi belanja modal yang proporsional adalah minimal 20% dari total belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan belanja pembangunan yang rendah, arah kebijakan anggaran cenderung bersifat konsumtif ketimbang produktif.

Rendahnya belanja pembangunan berdampak serius terhadap fungsi pelayanan publik, termasuk dalam sektor pangan dan hortikultura. Infrastruktur pertanian yang tidak memadai, minimnya fasilitas pendukung produksi, dan kurangnya pelatihan teknis bagi petani merupakan konsekuensi dari kebijakan anggaran yang belum berpihak pada penguatan sektor produktif. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Rahmawati (2024), yang menyatakan bahwa dominasi belanja operasional mempersempit ruang fiskal pembangunan daerah, khususnya dalam sektor strategis seperti pertanian dan ketahanan pangan.

Selain itu, keserasian belanja juga mencerminkan orientasi kebijakan pemerintah daerah. Dalam teori anggaran berbasis kinerja, pengeluaran daerah semestinya mencerminkan prioritas pembangunan

yang terukur hasilnya. Oleh karena itu, struktur belanja yang tidak seimbang menjadi indikator kurang efektifnya proses perencanaan pembangunan.

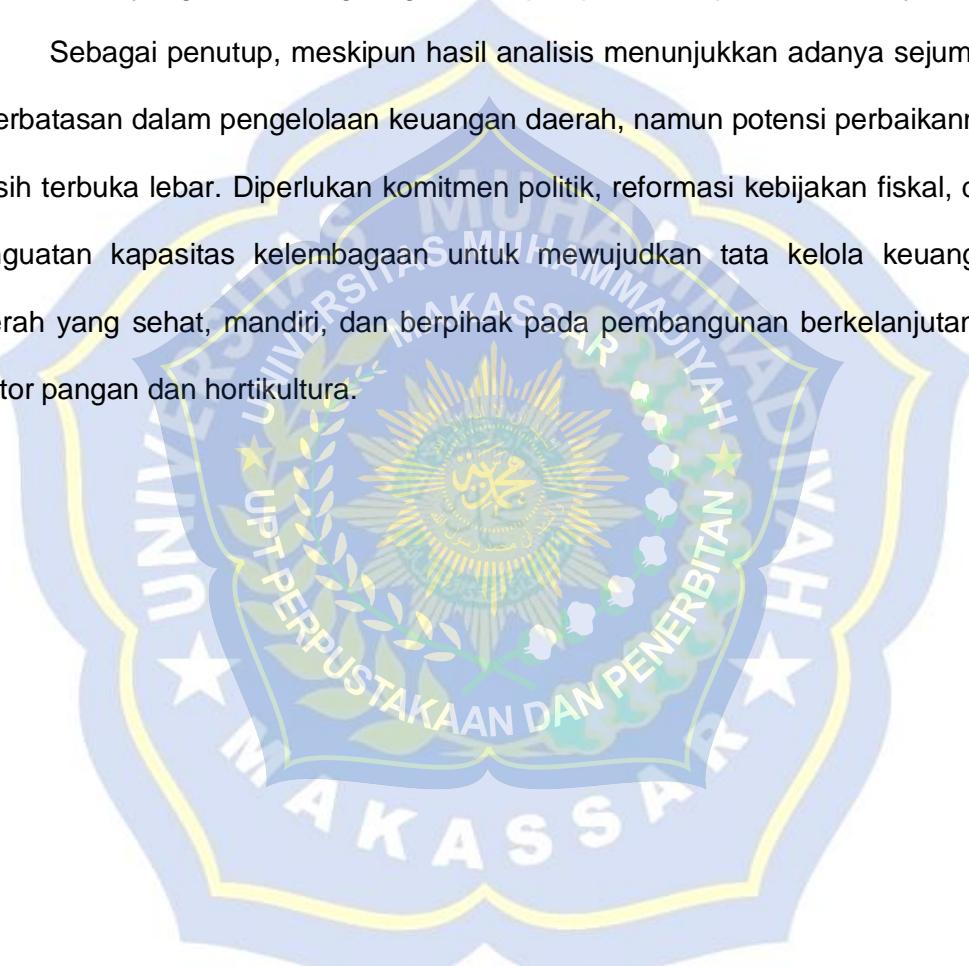
Ketiga rasio yang dianalisis RKKD, efektivitas PAD, dan rasio keserasian saling terkait secara sistemik dan mempengaruhi kapasitas institusi daerah. Dalam kerangka teori fiskal desentralisasi, kemampuan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara mandiri merupakan syarat utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan dalam analisis, ketiga indikator tersebut masih menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal, baik dari sisi pendapatan, realisasi target, maupun belanja pembangunan.

Situasi tersebut mempertegas bahwa perlu ada transformasi fiskal secara menyeluruh. Langkah-langkah seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan belanja pembangunan yang produktif, serta reformasi sistem penganggaran perlu segera dilakukan. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata melalui konsep agrowisata hortikultura, yang terbukti mampu meningkatkan PAD dan memberdayakan masyarakat lokal.

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam sektor hortikultura juga dapat meningkatkan efisiensi layanan, mendorong produktivitas, dan membuka peluang kerja sama investasi dengan pihak swasta. Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT), sistem informasi geografis (GIS), serta pengembangan database petani dan komoditas unggulan dapat menjadi landasan reformasi sistem keuangan dinas berbasis data. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan alokasi anggaran secara terukur.

Dengan demikian, pemberian keuangan daerah harus dibarengi dengan pendekatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal. Pemerintah daerah bersama DPRD dan perangkat teknis, termasuk Dinas Pangan dan Hortikultura, perlu menyusun strategi fiskal yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya untuk sektor-sektor yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, meskipun hasil analisis menunjukkan adanya sejumlah keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun potensi perbaikannya masih terbuka lebar. Diperlukan komitmen politik, reformasi kebijakan fiskal, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, mandiri, dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan di sektor pangan dan hortikultura.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tren membaik, namun masih berada dalam kategori rendah. Peningkatan berkelanjutan harus difokuskan pada penguatan PAD dan efisiensi belanja. Efektivitas PAD menurun secara konsisten, mengindikasikan perlunya evaluasi target PAD dan optimalisasi strategi pemungutan. Rasio Keserasian yang rendah mengindikasikan dominasi belanja operasional. Perlu pergeseran kebijakan untuk meningkatkan belanja pembangunan guna mendukung sektor pertanian hortikultura secara struktural.

B. Saran

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang perlu meningkatkan produktivitas PAD berbasis sektor unggulan (pertanian dan hortikultura), misalnya dengan mengenakan retribusi jasa pasca panen, distribusi, dan pelatihan pertanian.
2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang perlu melakukan optimalisasi penggunaan dana operasional agar sebagian dapat dialihkan ke belanja pembangunan, seperti irigasi teknis dan infrastruktur pasar tani.
3. Melakukan perencanaan fiskal jangka menengah yang berorientasi pada peningkatan rasio keserasian dan kemandirian fiskal melalui kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*)

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A. (2024). OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Akbar, S. W. (2024). Pengaruh Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018-2022) (Doctoral dissertation, IPDN).
- Akib, M., Nurdin, E., & Fadiah, R. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 38-53.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83-93.
- Amu, A. P., Niswatin, N., & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291-307.
- Arifin, A. (2018). *Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2016*. 32, 1–41.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Badali, M. A., Setiawan, I., Urahmah, N., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Amuntai, P. (2022). *Pengelolaan dana desa pada desa pulantani kecamatan haur gading kabupaten hulu sungai utara*. 113, 1–10.

- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandiriann Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1170–1181.
- Endang Purwanti, E. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah kota Salatiga Tahun 2014-2018 Endang Purwanti 1 , Elien Noviyanti 2. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.
- Hastiwi, M., Novilasari, E. D., & Nugroho, N. T. (2022). Pentingnya Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1), 16–24.
- Irwan Moridu. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Karlina, A., & Handayani. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–912.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Nirma. (2018). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG*. 3(2), 91–102.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas

- Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamalang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Qosasi, A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengukuran Kinerja Dalam Prespektif Value for Money Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–15.
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3846>
- Ratu, V. W. E., Maramis, J. B., & Rumokoy, L. J. (2023). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Dan Non Kepulauan Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 1428–1438. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.50143>
- Riana, D. (2021). Evaluasi Kinerja Manajemen dan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Bisnis*, 1(2), 2723–6056.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Senapan, Ema, N. I. F., & Agus, E. S. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal,

- Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>
- Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(32), 236–242.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Syaharman, S. (2021). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Pt. Narasindo Mitra Perdana. *Juripol*, 4(2), 283–295. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11151>
- Syaifanur, F., & Saleh, M. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Blud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 252–258. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21153>

LAMPIRAN



LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2022**

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi | Realisasi Tahun 2021 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 125,000,000.00 | Rp 157,300,000.00 | Rp 154,800,000.00 |
| B | Belanja Operasi | Rp 22,518,435,672.00 | Rp 20,531,842,899.00 | Rp 26,509,173,238.00 |
| | 6. Belanja pegawai | Rp 10,090,944,291.00 | Rp 10,067,144,291.00 | Rp 9,755,181,196.00 |
| | 7. Belanja barang dan jasa | Rp 4,717,387,314.00 | Rp 4,578,906,841.00 | Rp 9,608,134,720.00 |
| | 8. Belanja pemeliharaan | Rp 75,000,000.00 | Rp 75,000,000.00 | Rp 89,400,000.00 |
| | 9. Belanja Perjalanan Dinas | Rp 2,392,907,604.00 | Rp 2,392,052,263.00 | Rp 2,306,306,239.00 |
| | 10. Belanja hibah | Rp 7,710,104,067.00 | Rp 5,885,791,767.00 | Rp 7,145,857,322.00 |
| C | Belanja modal | Rp 69,818,004.00 | Rp 69,818,004.00 | Rp 1,709,544,991.00 |
| D | Jumlah belanja | Rp 22,588,253,676.00 | Rp 20,601,660,903.00 | Rp 28,218,718,229.00 |
| E | Surplus/Defisit | Rp - 22,463,253,676.00 | Rp - 20,444,360,903.00 | Rp -28,063,918,229.00 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2023**

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2023 | Realisasi | Realisasi Tahun 2022 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 130,000,000.00 | Rp 152,950,000.00 | Rp 157,300,000.00 |
| B | Belanja operasional | Rp 55,005,300,191.00 | Rp 44,082,151,484.00 | Rp 20,531,842,899.00 |
| | 6. Belanja pegawai | Rp 9,963,847,367.00 | Rp 9,893,891,131.00 | Rp 10,067,144,291.00 |
| | 7. Belanja barang dan jasa | Rp 11,580,285,624.00 | Rp 10,464,629,753.00 | Rp 4,578,906,841.00 |
| | 8. Belanja pemeliharaan | Rp 100,250,000.00 | Rp 99,115,000.00 | Rp 75,000,000.00 |
| | 9. Belanja Perjalanan Dinas | Rp 6,087,921,224.00 | Rp 5,656,929,838.00 | Rp 2,392,052,263.00 |
| | 10. Belanja hibah | Rp 33,461,167,200.00 | Rp 23,723,630,600.00 | Rp 5,885,791,767.00 |
| C | Belanja modal | Rp 7,094,400,000.00 | Rp 5,629,567,600.00 | Rp 69,818,004.00 |
| D | Jumlah belanja | Rp 62,099,700,191.00 | Rp 49,711,719,084.00 | Rp 20,601,660,903.00 |
| E | Surplus/Defisit | Rp - 61,969,700,191.00 | Rp - 49,558,769,084.00 | Rp -20,444,360,903.00 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2024**

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2024 | Realisasi | Realisasi Tahun 2023 |
|----|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 161,200,000.00 | Rp 167,350,000.00 | Rp 152,950,000.00 |
| B | Belanja operasional | Rp 54,167,648,549.00 | Rp 39,408,160,880.00 | Rp 44,082,151,484.00 |
| | 6. Belanja pegawai | Rp 11,434,558,019.00 | Rp 11,204,294,837.00 | Rp 9,893,891,131.00 |
| | 7. Belanja barang dan jasa | Rp 8,419,914,630.00 | Rp 5,356,154,735.00 | Rp 10,464,629,753.00 |
| | 8. Belanja pemeliharaan | Rp 78,390,000.00 | Rp 54,118,970.00 | Rp 99,115,000.00 |
| | 9. Belanja Perjalanan Dinas | Rp 4,118,626,030.00 | Rp 2,481,975,706.00 | Rp 5,656,929,838.00 |
| | 10. Belanja hibah | Rp 34,313,175,900.00 | Rp 22,847,711,308.00 | Rp 23,723,630,600.00 |
| C | Belanja modal | Rp 450,000,000.00 | Rp 0.00 | Rp 5,629,567,600.00 |
| D | Jumlah belanja | Rp 54,617,648,549.00 | Rp 39,408,160,880.00 | Rp 49,711,719,084.00 |
| E | Surplus/Defisit | Rp - 54,456,448,549.00 | Rp - 39,240,810,880.00 | Rp -49,558,769,084.00 |

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2022
PER 31 DESEMBER 2022

OPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| NO | URAIAN/ KEGIATAN/PEKERJAAN | PAGU ANGGARAN 2022 | NAMA REKANAN | NOMOR/TANGGAL BAST/BAST-PHO |
|----|--|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi | <u>20,000,000</u> | | |
| | Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 20,000,000 | | |
| 1 | - Alat Perontok Padi (DAU) | 16,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 010/BASTP-HORTI/DTPHP/XI/2022 Tgl. 11 November 2022 |
| 2 | - Pengadaan Corn Sheller (DAU) | 10,000,000 | CV. MANDIRI GARLICA PRATAMA (Yusuf Setiawan, ST) | 014/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2022 / Tgl. 06 Desember 2022 |
| 3 | - Pupuk Kimia | 199,760,000 | CV. ATHAR TUNAS MANDIRI (Abustam Edy S.Pd) | 071/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2021 Tgl. 17 Desember 2021 |
| 2. | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | <u>120,000,000</u> | | - |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|
| Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | 120,000,000 | | |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Alat Mesin Pengolah Rumput dan Pupuk Organik (DAU) | 10,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 013/BASTP-HORTI/DTPHP/XI/2022 / Tgl. 30 November 2022 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian (Jahe) | 100,000,000 | CV. MITRA FARM MAJU BERSAMA (Firdaus Latif) | 002/BASTP-HORTI/DTPHP/X/2022 / Tgl. 06 Oktober 2022 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Pompa Air untuk Pertanian (DAU) | 10,000,000 | PT. BAHAGIA JAYA SEJAHTERA | |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Kadingeh | 30,000,000 | CV. INFILM PRATAMA (Satria) | 052/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 22 Desember 2022 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Pompanisasi Kelompok Tani Persipala | 100,000,000 | CV. NAHDA KARIA MANDIRI (Fadly Jafar) | 036/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> - Embung Batili Kelurahan Galonta (DAU) | 10,000,000 | CV. LINTIK JAYA RAYA (Jumadil, ST) | 030/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 12 November 2022 |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> - Embung Desa Botto Mallangga (DAU) | 10,000,000 | CV. MITRA MATAJANG (Iskandar Kuba) | 012/BASTP-PHO/DTPHP/X/2022 Tgl. 27 Oktober 2022 |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> - Embung Desa Kaluppang | 50,000,000 | CV. MITRA MATAJANG (Iskandar Kuba) | 047/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 05 Desember 2022 |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> - Embung Desa Labuku Kecamatan Maiwa | 50,000,000 | CV. MITRA MATAJANG (Iskandar Kuba) | 014/BASTP-PHO/DTPHP/X/2022 Tgl. 27 Oktober 2022 |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Embung Rano, Desa Baruka, Kec. Bungin | 60,000,000 | CV. BUNGIN PARADISE (Muallin Oncing) | 028/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |

| | | | | |
|----|--|-------------|--|--|
| 11 | - Embung Tuncung | 50,000,000 | CV. LINTIK JAYA RAYA (Jumadil, ST) | 015/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 04 November 2022 |
| 12 | - Pembangunan Embung Desa Tungka | 50,000,000 | CV. AKBAR (A. Sirajuddin Tjambe) | 034/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 29 November 2022 |
| 13 | - Pembangunan Embung Karrang Desa Karrang | 50,000,000 | CV. TOPAS (Sernando, ST) | 048/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 14 | - Pembangunan Embung Lando Desa Taulan | 50,000,000 | CV. MEGA PUTRI (Andi Mursal) | 025/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 15 | - Pembangunan Embung Langga Tallu Desa Karrang (DAU) | 10,000,000 | CV. TOPAS (Sernando, ST) | 023/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 16 | - Pembangunan Embung Tuncung Desa Taulan (DAU) | 10,000,000 | CV. MEGA PUTRI (Andi Mursal) | 049/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 17 | - Pembuatan Embung Desa Tungka | 50,000,000 | CV. MITRA WOOD (Sisva, SS) | 037/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl 23 November 2022 |
| 18 | - Embung 2 Kelurahan Balla | 50,000,000 | CV. RESKI NADIBA SANTO (Andi Sandar Mas) | 016/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 10 November 2022 |
| 19 | - Embung Klp Tani Buntu Pongsu Kel. Lakawan | 50,000,000 | CV. MASPUL SAWERIGADING (Fauziah) | 022/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 17 November 2022 |
| 20 | - Jalan Tani Kalewai Tontonan Kelurahan Tanete | 100,000,000 | CV. TOPAS (Sernando, ST) | 062/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 29 Desember 2022 |
| 21 | - Jalan Tani Lombo Wasin Ongko Kelurahan Bangkala | 200,000,000 | CV. ALFAIM PUTRA RAKYNDO (Alimuddin, ST) | 021/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |

| | | | | |
|----|--|-------------|--|--|
| 22 | - Jalan Tani Nunang Mila Dusun Gura Desa Buntu Mondong | 50,000,000 | CV. MEGA PUTRI (Andi Mursal) | 061/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 14 Desember 2022 |
| 23 | - JUT Buttu Batu | 50,000,000 | CV. NAFAL REZKI ABADI (Rano Karno A, ST) | 065/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 08 Desember 2022 |
| 24 | - JUT Gandeng-Matangon Desa Salu Kanan | 100,000,000 | CV. PALIMBANGUN JAYA (Akram, SE) | 060/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 27 Desember 2022 |
| 25 | - JUT Kulinjang | 50,000,000 | CV. NAFAL REZKI ABADI (Rano Karno A, ST) | 069/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 / Tgl. 08 Desember 2022 |
| 26 | - JUT Lempujang Rumbia | 50,000,000 | CV. AQSA MENITI (Sahrul) | 007/BASTP-PHO/DTPHP/X/2022 Tgl. 18 Oktober 2022 |
| 27 | - JUT Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja | 100,000,000 | CV. AQSA MENITI (Sahrul) | 031/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 18 November 2022 |
| 28 | - Pembangunan Jalan Tani Lambanan Desa Sanglepongan Curio | 100,000,000 | CV. MITRA WOOD (Sisva, SS) | 035/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 29 | - Pembangunan Jalan Usaha Tani Mata Wai Botto Jambu Desa Bontongan | 30,000,000 | CV. LINTIK JAYA RAYA (Jumadil, ST) | 024/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 18 November 2022 |
| 30 | - Pembangunan JUT Lebani | 50,000,000 | CV. TENRIHERNA (Andi Nyukki) | 027/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 17 November 2022 |
| 31 | - Pembangunan Jalan Tani Desa Pinang Kecamatan Cendana | 150,000,000 | CV. AKBAR (A Sirajuddin Tjambe) | 046/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 32 | - Pembangunan Jalan Tani Dusun Kara Siduk Desa Tallungura | 50,000,000 | CV. CAHAYA KALUMPANG (Harun Anwar) | 043/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 33 | - Pengecoran JUT Dusun Manggugu Pekuburan Desa Tampo | 50,000,000 | CV. MUFLIJAYA CORP (Fachrul) | 059/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 21 Desember 2022 |

| | | | | |
|----|--|-------------|--|--|
| 34 | - Pengcoran JUT Dusun To Cemba Desa Mata Allo | 80,000,000 | CV. XAVIER KONSTRUKSI (Burhanuddin, ST) | 058/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 19 Desember 2022 |
| 35 | - Pengerasan Jalan Tani Bubun Ba'ka Buntu Tokke | 30,000,000 | CV. MUFLIJAYA CORP (Fachrul) | 057/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 23 Desember 2022 |
| 36 | - Pengerasan Jalan Tani Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa | 50,000,000 | CV. MITRA WOOD (Sisva, SS) | 026/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 01 Desember 2022 |
| 37 | - Pengerasan JUT Batu Sitodo Desa Mandalan Kecamatan Curio | 50,000,000 | CV. AQSA MENITI (Sahrul) | 064/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 15 Desember 2022 |
| 38 | - Pengerasan JUT Loko-Eran Batu | 100,000,000 | CV. BUNGIN PARADISE (Muallim Oncing) | 038/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 28 November 2022 |
| 39 | - Pengerasan JUT Sajuan-Buntu Bila Desa Mandalan | 50,000,000 | CV. AQSA MENITI (Sahrul) | 063/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 15 Desember 2022 |
| 40 | - Peningkatan Jalan Tani Sikolong Pangmaroan Desa Sanglepongan | 50,000,000 | CV. CAHAYA KALUMPANG (Harun Anwar) | 068/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 29 Desember 2022 |
| 41 | - Perintisan JUT Loka - Lembongan Rogo | 65,000,000 | CV. RESKI NADIBA SANTO (Andi Sandar Mas) | 029/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 42 | - Perintisan JUT Sarambu | 50,000,000 | CV. RESKI NADIBA SANTO (Andi Sandar Mas) | 066/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 15 Desember 2022 |
| 43 | - Perintisan Jalan Padang Benteng Alla Utara | 70,000,000 | CV. XAVIER KONSTRUKSI (Burhanuddin, ST) | 020/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |

| | | | | |
|----|--|-------------|--|--|
| 44 | - Pembangunan JUT Palangkea Mareto | 200,000,000 | CV. XAVIER KONSTRUKSI (Burhanuddin, ST) | 017/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 45 | - Jalan Usahatani Cendana | 90,000,000 | CV. INFILM PRATAMA (Satria) | 067/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 24 November 2022 |
| 46 | - Jalan Usahatani Karuru Karoan | 50,000,000 | CV. MEGA PUTRI (Andi Mursal) | 056/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 22 Desember 2022 |
| 47 | - Jalan Usahatani Liangbai | 100,000,000 | CV. TOPAS (Sernando, ST) | 055/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 30 Desember 2022 |
| 48 | - Jalan Usahatani Buntu Batu | 50,000,000 | CV. BUNGIN PARADISE (Muallim Oncing) | 054/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2022 Tgl. 12 Desember 2022 |
| 49 | - Pengerasan Jalan Tani Kalosi Dalam Kalimbuwa | 75,000,000 | CV. ANDA RAYA UTAMA (Sainuddin Lita, SE) | 032/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2022 Tgl. 01 Desember 2022 |
| 50 | - Konsultan Perencana Pembangunan Prasarana Pertanian | 10,000,000 | CV. MUTIARA DUTA PLAN (Basri, ST) | 016/BASTP- TP/DTPHP/VIII/2022 Tgl. 10 Agustus 2022 |
| 51 | - Konsultan Pengawas Pembangunan Prasarana Pertanian (DAU) | 10,000,000 | CV. TANTAMA RAYA MANDIRI KONSULTAN (Hardedi) | 018/BASTP- TP/DTPHP/XII/2022 Tgl. 09 Desember 2022 |

Kepala Dinas,

Enrekang, 31 Desember
2022

Bendahara Pengeluaran

ADDI, SP. MM

Nip. 197312311999031026

SULFIATI, SM

Nip. 19780808 201001 2 022

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

OPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

| NO | URAIAN/ KEGIATAN/PEKERJAAN | PAGU 2023 | NAMA REKANAN | NOMOR BAST/BAST-PHO | |
|----|--|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 1. | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi | <u>3.130.724.000</u> | | | |
| | Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 3,130,724,000 | | | |
| 1 | Instalasi Pertanian Regeneratif | 1,662,248,000 | CV. MUTHIA KARYA MANDIRI (Subakri) | 0110/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 | |
| 2 | Pengadaan Sarana Pasca Panen (Rice Milling Unit) | 1,400,000,000 | PT. PURA BARUTAMA (Dedy Dafianto) | 020/BASTP-HORTI/DTPHP/IX/2023 | |
| 3 | - Pengadaan 4 Unit Cultivator | 48,300,000 | PT. TANIKAYA MULTISARANA (Priyono Budi Santoso) | 04/BASTP-HORTI/DTPHP/VII/2023 | |
| 4 | - Pengadaan 4 Unit Pompa Air | 20,176,000 | PT. TANIKAYA MULTISARANA (Priyono Budi Santoso) | 05/BASTP-HORTI/DTPHP/VII/2023 | |
| 2. | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | <u>10,559,600,000</u> | | | - |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | 10,559,600,000 | | |
| 1 | - Pengadaan Cultivator | | PT. RUTAN (Moh. Ardani, ST) | 010/BASTP-HORTI/DTPHP/VI/2023 |
| 2 | Pengadaan Cultivator | 6,546,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 032/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 3 | - Pengadaan Dros Jagung (DAU) | 10,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 033/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 4 | - Mesin Dros Jagung | 50,000,000 | CV. PUTRA MATAJANG (Jumaming, S.Kom) | 028/BASTP-HORTI/DTPHP/XI/2023 |
| 5 | - Pengadaan Bibit Cengkeh | 200,000,000 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | 023/BASTP-HORTI/DTPHP/XI/2023 |
| 6 | - Pengadaan Bibit Kopi | 400,000,000 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | 012/BASTP-HORTI/DTPHP/IX/2023 |
| 7 | - Pengadaan Bibit Lada | 150,000,000 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | 022/BASTP-HORTI/DTPHP/XI/2023 |
| 8 | Pengadaan Bibit Pala | 300,000,000 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | 027/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 9 | - Pengadaan Hand Sprayer | 1,722,600,000 | PT. GLOBAL NURAGA PERKASA (Soraya Balgis) | 09/BASTP-HORTI/DTPHP/VI/2023 Tgl. 19 Juni 2023 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 10 | - | Pengadaan Hand Sprayer | | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 034/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 11 | - | Pengadaan Hand Traktor | 300,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 035/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 12 | - | Pengadaan Hand Traktor | 145,000,000 | CV. PUTRA MATAJANG (Jumaming, S.Kom) | 031/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 13 | - | Pengadaan Hand Traktor (DAU) | 18,000,000 | CV. PUTRA MATAJANG (Jumaming, S.Kom) | 030/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 14 | | Pengadaan Mesin Pencacah Rumput | 45,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 036/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 15 | - | Pengadaan Pompa Air | 45,000,000 | CV. PUTRA MATAJANG (Jumaming, S.Kom) | 026/BASTP-HORTI/DTPHP/XI/2023 |
| 16 | | Pengadaan Pompa Air 4 Inch (DAU) | 10,000,000 | PT. BANNA RAYA SEJAHTERA (Noor Ferdiyansyah) | 037/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 17 | - | Pengadaan Pupuk Organik | 500,000,000 | CV. MITRA FARM MAJU BERSAMA (Firdaus Latif) | 029/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 18 | | Power Sprayer | 120,000,000 | CV. PHONNA RAYA MACHINERY (Budi Permana) | 038/BASTP-HORTI/DTPHP/XII/2023 |
| 3. | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | <u>905,000,000</u> | | - |
| | Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | 905,000,000 | | |
| 1 | - | Perpompaan Siduruk Sumbang | 60,000,000 | CV. TIMUR PRIMA (Marhaeni) | 0107/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |

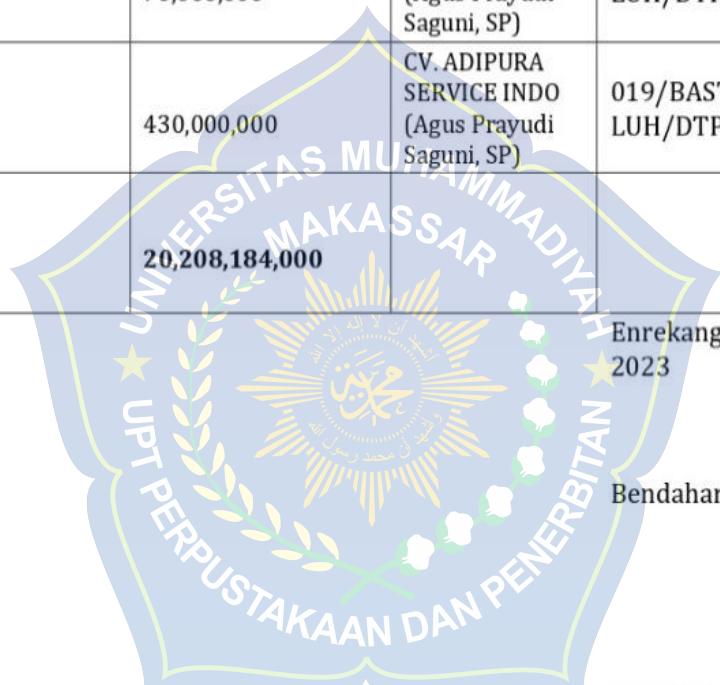
| | | | | | |
|----|---|--|-------------|--|-----------------------------------|
| 2 | - | Pipanisasi Buntu Rano (DAU) | 10,000,000 | CV. MELANESIA MULTI PERKASA (Daswar Pratama) | 086/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 3 | - | Pipanisasi KWT. Patang Kelurahan Baraka | 100,000,000 | CV. MELANESIA MULTI PERKASA (Daswar Pratama) | 095/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 4 | - | Pipanisasi Lunjen | 100,000,000 | CV. NAHDA KARIA MANDIRI (Fadly Djafar) | 088/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 5 | - | Pipanisasi Mekkala (DAU) | 10,000,000 | CV. TIMUR PRIMA (Marhaeni) | 0109/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 6 | - | Pompanisasi Balla | 55,000,000 | CV. BERKAT JAYA ABADI (Samuel) | 084/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 7 | - | Pompanisasi Batu Bukku | 50,000,000 | CV. TIMUR PRIMA (Marhaeni) | 0103/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 8 | - | Pompanisasi Buntu Bili | 200,000,000 | CV. BUNGIN PARADISE (Muallim Oncing) | 0104/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 9 | - | Pompanisasi Buntu Kiki | 80,000,000 | CV. TIMUR PRIMA (Marhaeni) | 0102/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 10 | - | Pompanisasi Kotu (DAU) | 10,000,000 | CV. AZKA MEGA PUTRA (Megawati) | 091/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 11 | - | Pompanisasi Mangguguh | 50,000,000 | CV. RAHMAT ILAHI (M. Taufiq S) | 0105/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 12 | - | Pompanisasi Saludewata | 60,000,000 | CV. TIMUR ENGINEERING (Amin) | 083/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 13 | - | Pompanisasi Tampo (DAU) | 10,000,000 | CV. TIMUR ENGINEERING (Amin) | 0106/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 14 | - | Pompanisasi Tontonan | 60,000,000 | CV. TIMUR ENGINEERING (Amin) | 085/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 15 | - | Pompanisasi Mundan | 50,000,000 | CV. CAHAYA RAHMAT TUJUH (Rachmat Faried) | 0108/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 4. | | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | <u>1,415,000,000</u> | | - |
| | | <i>Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i> | 1,415,000,000 | | |
| 1 | - | Pembangunan Embung-Embung Bae | 75,000,000 | CV. RESKI NADIBA SANTO (Abd. Abbas) | 015/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 2 | | Pembangunan Embung-Embung Biak | 50,000,000 | CV. BUNGIN PARADISE (Muallim Oncing) | 0186/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 3 | - | Pembangunan Embung-Embung Bolong Desa Pundilemo Cendana (DAU) | 10,000,000 | CV. INDI KARYA (Shindy Alifka Ainun) | 070/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 4 | - | Pembangunan Embung-Embung Botto Cendana | 75,000,000 | CV. MAZAIN COMPANY (Akhmad Husni) | 064/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 5 | - | Pembangunan Embung-Embung Bubun Batu | 75,000,000 | CV. CAHAYA KALUMPANG (Harun Anwar) | 0183/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 6 | - | Pembangunan Embung-Embung Cakke (DAU) | 10,000,000 | CV. ALDISYA JAYA MANDIRI (Hendra Sagitaningrat, ST) | 0191/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 7 | - | Pembangunan Embung-Embung Desa Cendana | 50,000,000 | CV. WALI PUTRA SELATAN (Hidayat Jafar) | 0172/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 8 | - | Pembangunan Embung-Embung Desa Taulan | 50,000,000 | CV. MITRA MATAJANG (Iskandar Kuba) | 0193/BASTP- PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 9 | - | Pembangunan Embung-Embung Desa Tuncung | 100,000,000 | CV. AKBAR (A. Sirajuddin Tjambe) | 071/BASTP- PHO/DTPHP/XI/2023 |

| | | | | | |
|----|---|--|----------------------|---|-------------------------------|
| 10 | - | Pembangunan Embung-Embung Dusun Balombong Desa Tirowali Baraka | 50,000,000 | CV. CHAZOLLOW KARYA MANDIRI (Wahidin) | 0177/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 11 | - | Pembangunan Embung-Embung Eran Batu | 50,000,000 | CV. CAHAYA ELANG SEMESTA (Fahmawati) | 0182/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 12 | - | Pembangunan Embung-Embung Gandang-Gandang Desa Pinang | 150,000,000 | CV. AKBAR (A. Sirajuddin Tjambe) | 016/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 13 | - | Pembangunan Embung-Embung Garoga Mata Allo | 70,000,000 | CV. XAVIER KONSTRUKSI (Burhanuddin) | 0187/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 14 | - | Pembangunan Embung-Embung Kaluppang | 50,000,000 | CV. ALDISYA JAYA MANDIRI (Hendra Sagitaningrat, ST) | 0192/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 15 | - | Pembangunan Embung-Embung Kampung Lapporan Desa Temban | 100,000,000 | CV. BITUNG MANIS (Busman H Alimuddin) | 0101/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 16 | - | Pembangunan Embung-Embung Landoke Pasui | 60,000,000 | CV. TOPAS (Sernando) | 026/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 17 | | Pembangunan Embung-Embung Loko Tontonan | 70,000,000 | CV. AZKA MEGA PUTRA (Megawati) | 087/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 18 | | Pembangunan Embung-Embung Mampu | 70,000,000 | CV. AZKA MEGA PUTRA (Megawati) | 097/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 19 | - | Pembangunan Embung-Embung Mangkawani | 50,000,000 | CV. NINGRAT JAYA MANDIRI (Citra Rahmadana, SH) | 031/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 20 | - | Pembangunan Embung-Embung Mangkawani 2 | 50,000,000 | CV. NINGRAT JAYA MANDIRI (Citra Rahmadana, SH) | 030/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 21 | - | Pembangunan Embung-Embung Ongko | 50,000,000 | CV. NINGRAT JAYA MANDIRI (Citra Rahmadana, SH) | 032/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 22 | - | Pembangunan Embung-Embung Papi | 100,000,000 | CV. PERKASA PUTRA (Hasan Sabarullah) | 092/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 5. | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | 1,020,000,000 | | - |

| | | | | |
|--|---|--|-------------|---|
| Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | 1,020,000,000 | | |
| 1 | - | Pembangunan Jalan Tani Laisong | 50,000,000 | CV. WALI PUTRA SELATAN (Hidayat Jafar) 0120/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 2 | - | Pembangunan Jalan Tani Limbuang | 50,000,000 | CV. AKBAR (Sirajuddin Tjambe) 0123/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 3 | - | Pembangunan Jalan Usaha Tani Sumbang | 100,000,000 | CV. RESKI NADIBA SANTO (Abd. Abbas) 0155/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 4 | - | Pembangunan JUT Ambo Laiba / Batu Api | 200,000,000 | CV. WALI PUTRA SELATAN (Hidayat Jafar) 0195/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 5 | - | Pembangunan JUT Angin-Angin Panggaragajian | 50,000,000 | CV. TIMUR JAYA (Andi Ansyaruddin) 0176/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 6 | - | Pembangunan JUT Baikang Lakoran | 200,000,000 | CV. MITRA MATAJANG (Iskandar Kuba) 068/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |
| 7 | - | Pembangunan JUT Balimbing | 100,000,000 | CV. TIMUR ENGINEERING (Amin) 0124/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 8 | - | Pembangunan JUT Ballang Mandalan | 100,000,000 | CV. LIMA NAGA (Sudiarto) 0135/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 9 | - | Pembangunan JUT Belalang Kel. Mataran | 120,000,000 | CV. GIO PRATAMA (Dewi Purnamasari) 0141/BASTP-PHO/DTPHP/XII/2023 |
| 10 | - | Pembangunan JUT Belalang Manggimbak | 50,000,000 | CV. BERKAT JAYA ABADI (Samuel) 0198/BASTP-PHO/DTPHP/XI/2023 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 6. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petan+D89+C90 | <u>3.177,860,000</u> | | |
| | <i>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i> | 3,177,860,000 | | |
| | - Pengadaan Kursi Plastik | 2,677,860,000 | PT. GRATIA AGUNG LESTARI (Widyawati) | 017/BASTP-LUH/DTPHP/IX/2023 |
| | - Pengadaan Polybag | 70,000,000 | CV. ADIPURA SERVICE INDO (Agus Prayudi Saguni, SP) | 018/BASTP-LUH/DTPHP/IX/2023 |
| | - Pengadaan Benih | 430,000,000 | CV. ADIPURA SERVICE INDO (Agus Prayudi Saguni, SP) | 019/BASTP-LUH/DTPHP/IX/2023 |
| | JUMLAH | 20,208,184,000 | | |



Enrekang, 31 Desember
2023

Bendahara Pengeluaran

Kepala Dinas,

ADDI, SP. MM
NIP. 19731231 199903 1
026

SULFIATI, SM
NIP. 19780808 201001 2
022

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. ENREKANG

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA HIBAH TA. 2024

PER 31 DESEMBER 2024

| No. | Jenis Belanja (Modal/Jasa/diserahkan ke masyarakat dll) | Nomor Kontrak/SPK/Swakelola | | Uraian Pekerjaan | Pagu (Rp) |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|---------------|
| | | NOMOR | PENYEDIA | | |
| 1 | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 3,600,000,000 |
| | Blj. Hibah | 01/SP/HORTI-APBD/DTPHP/I/2024 | CV. ANJARI ATHA TANAYA (Ayunun Jariah, SE) | Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) | 3,000,000,000 |
| | Blj. Hibah | 02/SP/HORTI-APBD/DTPHP/X/2024 | CV. SYAHRYANDI ASHAR UTAMA (Andi Muh. Ashar HP, SE) | Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) | 600,000,000 |
| 2 | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1,328,850,100 |
| | Blj. Hibah | 02/SP/BUN-APBD/DTPHP/I/2024 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | Pengadaan Bibit Cengkeh | 500,000,000 |
| | Blj. Hibah | 03/SP/BUN-APBD/DTPHP/IX/2024 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | Pengadaan Bibit Cengkeh | 269,265,150 |
| | Blj. Hibah | 01/SP/BUN-APBD/DTPHP/I/2024 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | Pengadaan Bibit Pala | 500,000,000 |
| | Blj. Hibah | 04/SP/BUN-APBD/DTPHP/IX/2024 | PENANGKAR BENIH HIJAU LESTARI (Sinarto) | Pengadaan Bibit Pala | 59,584,950 |
| 3 | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 410,000,000 |
| | Blj. Hibah | 07/SPK-EMBUNG-BUN/DAU/DTPHP/IX/2024 | CV. MARETO ALFA LESTARI (Jasfar) | Pembangunan Embung-Embung Mangkawani Pumbakkang | 100,000,000 |

| | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|
| | Bij. Hibah | 04/SPK-EMBUNG-BUN/DAU/DTPHP/IX/2024 | CV. RAJA AZKIAH (Kaharuddin) | Pembangunan Embung-Embung Tapong Delima | 100,000,000 |
| | Bij. Hibah | 06/SPK-EMBUNG-BUN/DAU/DTPHP/IX/2024 | CV. NINGRAT JAYA MANDIRI (Citra Rahmadana, SH) | Pembangunan Embung-Embung Tapong Mappapole Bisesa | 100,000,000 |
| | Bij. Hibah | 03/SPK-EMBUNG-BUN/DAU/DTPHP/IX/2024 | CV. NINGRAT JAYA MANDIRI (Citra Rahmadana, SH) | Pembangunan Embung-Embung Tapong Massituru (DAU) | 50,000,000 |
| | Bij. Hibah | 05/SPK-EMBUNG-BUN/DAU/DTPHP/IX/2024 | CV. NINGRAT JAYA MANDIRI (Citra Rahmadana, SH) | Pembangunan Embung-Embung Tapong Pelangi Indah (DAU) | 60,000,000 |
| 4 | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | 2,400,000,000 |
| | Bij. Hibah | 03/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT GEMBALA RANCH (Hendratno Alfonso) | Pembangunan JUT Bangkala Gembala Ranch | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 26/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT SIKATUTUI (Silen) | Pembangunan JUT Batu Kede Sikatutui | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 19/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT KABO KABO (Suratman Razak) | Pembangunan JUT Bonto Kabo Kabo | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 09/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT LANGDI (Ahmad) | Pembangunan JUT Bontongan Langdi | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 05/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT BOTTO CENDANA (Jumail) | Pembangunan JUT Botto Mallanga Botto Cendana | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 15/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT BUNGA WAI (Supriadi) | Pembangunan JUT Bubun Lamba Bunggawai | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 21/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT PEMUDA TANI BUKA (Suriadi) | Pembangunan JUT Dulang Pemuda Tani Buka | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 22/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT MITRA MANDIRI (Nur Amin Syah) | Pembangunan JUT Kambiolangi Mitra Mandiri | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 10/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT BUNTU TANJUNG (Sahril) | Pembangunan JUT Kendenan Buntu Tanjung | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 16/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT TUNAS HARAPAN MAMPU (Fachmi Hafid) | Pembangunan JUT Mampu Tunas Harapan Mampu | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 04/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT PUDE JAYA (Muh. Jamil Patji) | Pembangunan JUT Mangkawani Pude Jaya | 200,000,000 |
| | Bij. Hibah | 24/KS-JUT TAMPAK/DTPHP/V/2024 | KT SIPATUO (Samsul Bahtiar) | Pembangunan JUT Masalle Sipatuo | 200,000,000 |
| 5 | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | 3,020,000,000 |
| | Bij. Hibah | 02/SPK/TENDER-UPH/DTPHP/VII/2024 | CV. SILFA DUABELAS (Asrul Hidayat) | Bangunan UPH Kopi | 1,380,000,000 |
| | Bij. Hibah | 01/SP/PANGAN-APBD/DTPHP/VII/2024 | PT DAYA SENTOSA REKAYASA (Petrus Andianto) | Pembangunan Screen House Modern | 500,000,000 |
| | Bij. Hibah | 02/SP/PANGAN-APBD/DTPHP/VII/2024 | PT.PUTRA WIRA TAMTAMA | Solar Dryer | 1,140,000,000 |

| 6 | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 2,500,000,000 |
|--------------|------------|---------------------------|---|---|-----------------------|
| | Blj. Hibah | 141/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Mammase (Syafuddin Halid) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Bangkala Mammase | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 142/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Tunas Jaya (Alimuddin Akhmad S,Pd) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Bangkala Tunas Jaya | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 146/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Bubung Pitu (Sudirman) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Boiya Bubun Pitu | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 145/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Sipatuo (Muhammad Saleh) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Boiya Sipatuo | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 147/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Botto Gong (Bayu) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Botto Mallangga Botto Gong | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 148/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Indo Anna (Muhammad Amir) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Botto Mallangga Indo Anna | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 140/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Lalle Mandiri (Muhammad Aras) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Pattondonsalu Lalle Mandiri | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 139/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Sinar Harapan (Muhammad Syafyuddin) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Pattondonsalu Sinar Harapan | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 144/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Cahaya Mulia (Muttalib) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Salodua Cahaya Mulia | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 143/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Harapan Baru (Puli) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Salodua Harapan Baru | 150,000,000 |
| | Blj. Hibah | 048/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Lawale (Arifin) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Balla Lawale | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 109/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT Lanbawa (Hermin Sita Pangjoli) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Benteng Alla Lanbawa | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 108/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT Landokadawang Atas (Rustum Allu) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Benteng Alla Landokadawang Atas | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 106/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KWT Tombongan (Nurhayati) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Benteng Alla Tombongan | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 107/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT Tunas Muda (Herdianto T B) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Benteng Alla Tunas Muda | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 104/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT Sari Kembang (Mustakim Cendi) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Benteng Alla Utara Sari Kembang | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 105/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT Tengko Situru (Waluddin) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Benteng Alla Utara Tengko Situru | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 044/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT Dante Lopi (Muhlis, SE) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Bontongan Dante Lopi | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 043/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Sipatuju (Safwan Yasir) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Bontongan Sipatuju | 100,000,000 |
| | Blj. Hibah | 002/KS-HORTI/DTPHP/V/2024 | KT. Bubun Wasing (Ansar) | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Botto Mallangga Bubun Wasing | 100,000,000 |
| TOTAL | | | | | 13,258,850,100 |

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alaeddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0111)865588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6362/05/C.4-VIII/II/1446/2025

25 February 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 Sya'ban 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 413/05/A.2-II/II/46/2025 tanggal 24 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RISKY AYU FADILAH

No. Stambuk : 10572 1123121

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Manajemen

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Februari 2025 s/d 28 April 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

أَنْسَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

LAMPIRAN SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Poros Enrekang Rappang Km. 3 Enrekang
Laman : www.distan.enrekangkab.go.id; Pos-el : distanbunekg@gmail.com
ENREKANG Kode Pos 91712

| LEMBAR DISPOSISI | | | |
|--|--|--------|---------|
| Surat Dari: Universitas Muhammadiyah Makassar No. Surat : 6362/05/04-VII/11/1446 / 2025 Tgl Surat : 25 februari 2025 | Diterima Tgl : 24 Maret 2025 No. Agenda : 65 Sifat : Sangat Segera | SEGERA | RAHASIA |
| Hal : Permohonan izin Penelitian | Dengan Hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses Lebih Lanjut Koordinasi/Konfirmasi | | |
| Diteruskan Kepada Sdr : <i>Sehidis</i> | | | |
| Catatan : <i>Telah diberi tgl. 24/3/2025</i> | | | |

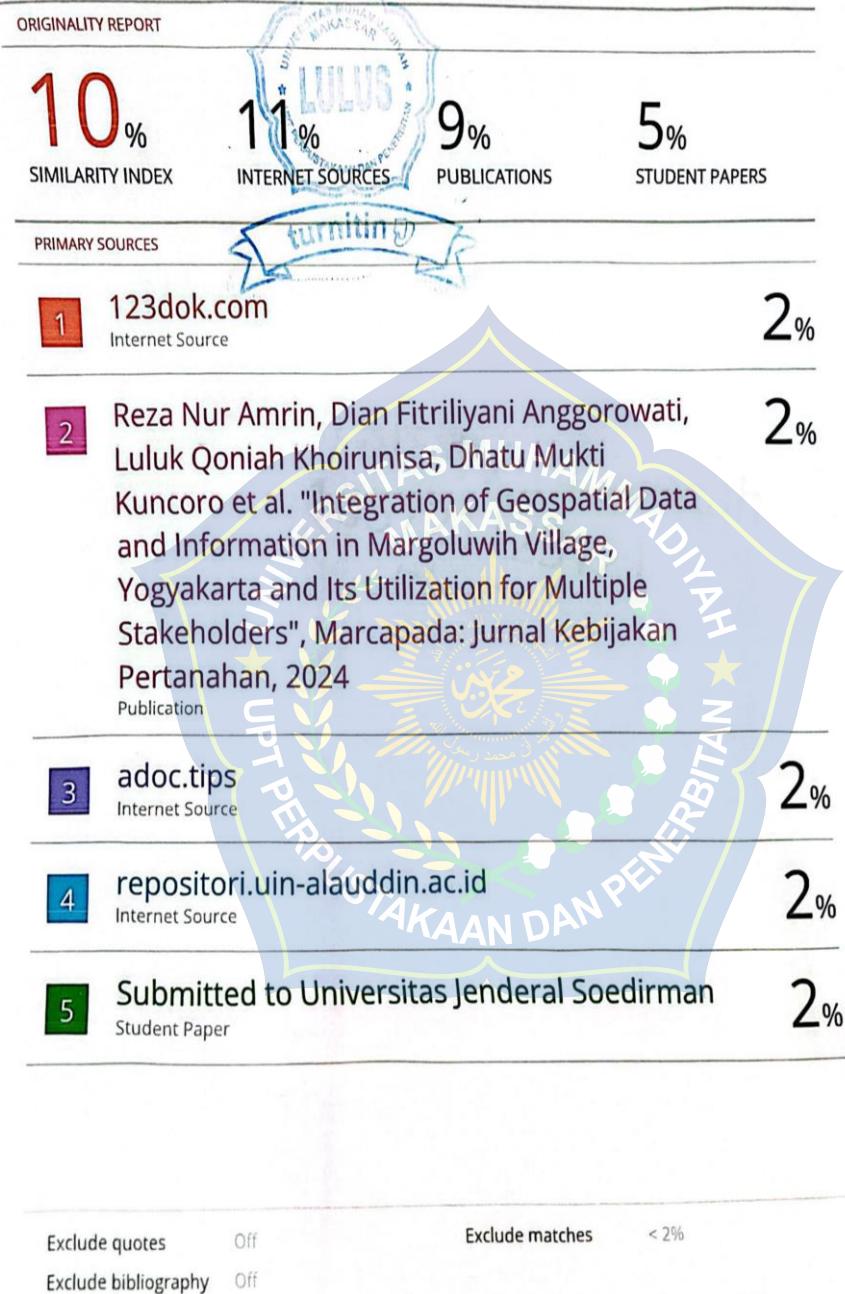
LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



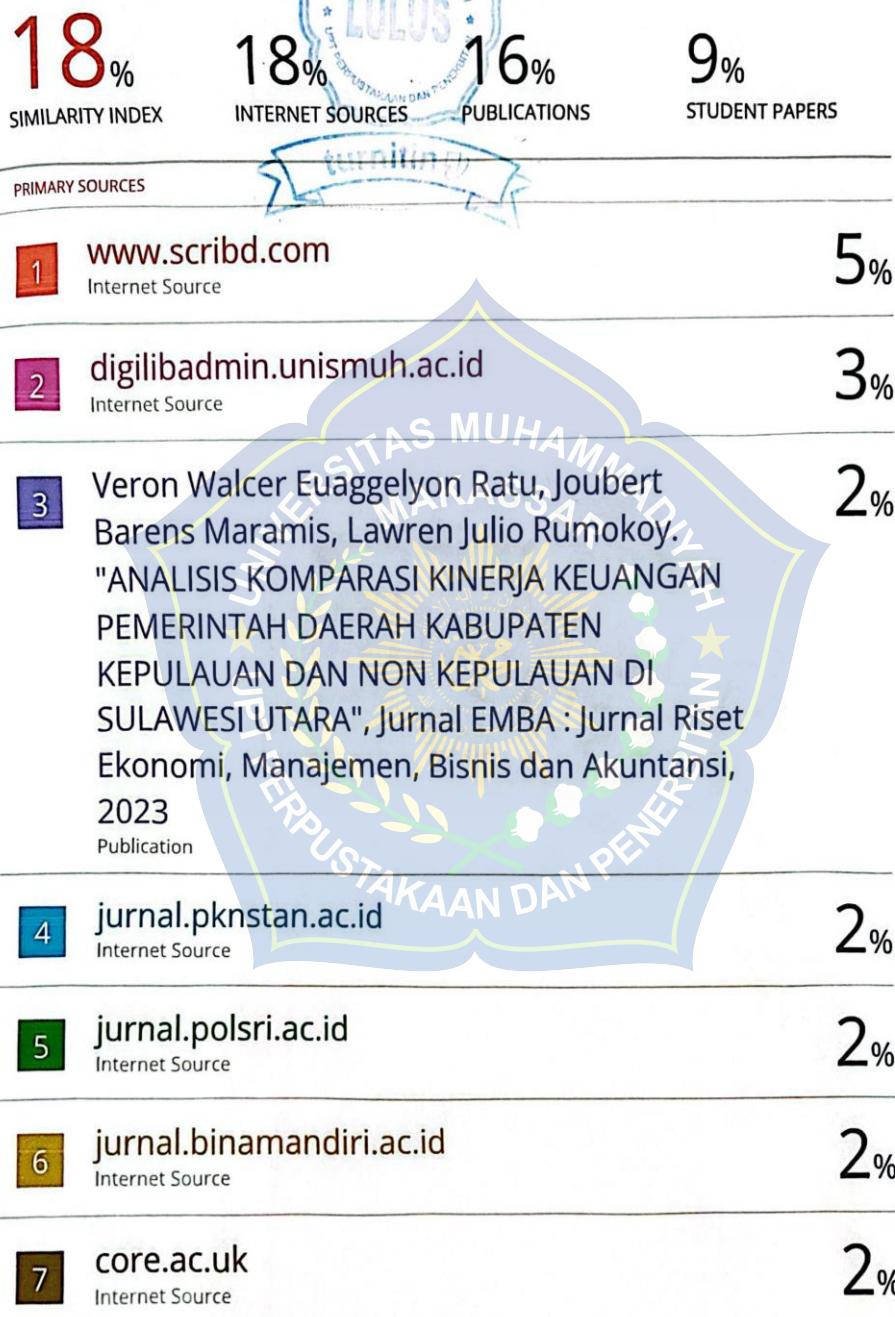
Lampiran Bukti Tes Plagiasi BAB I-V

Bab I Risky Ayu Fadilah 105721123121

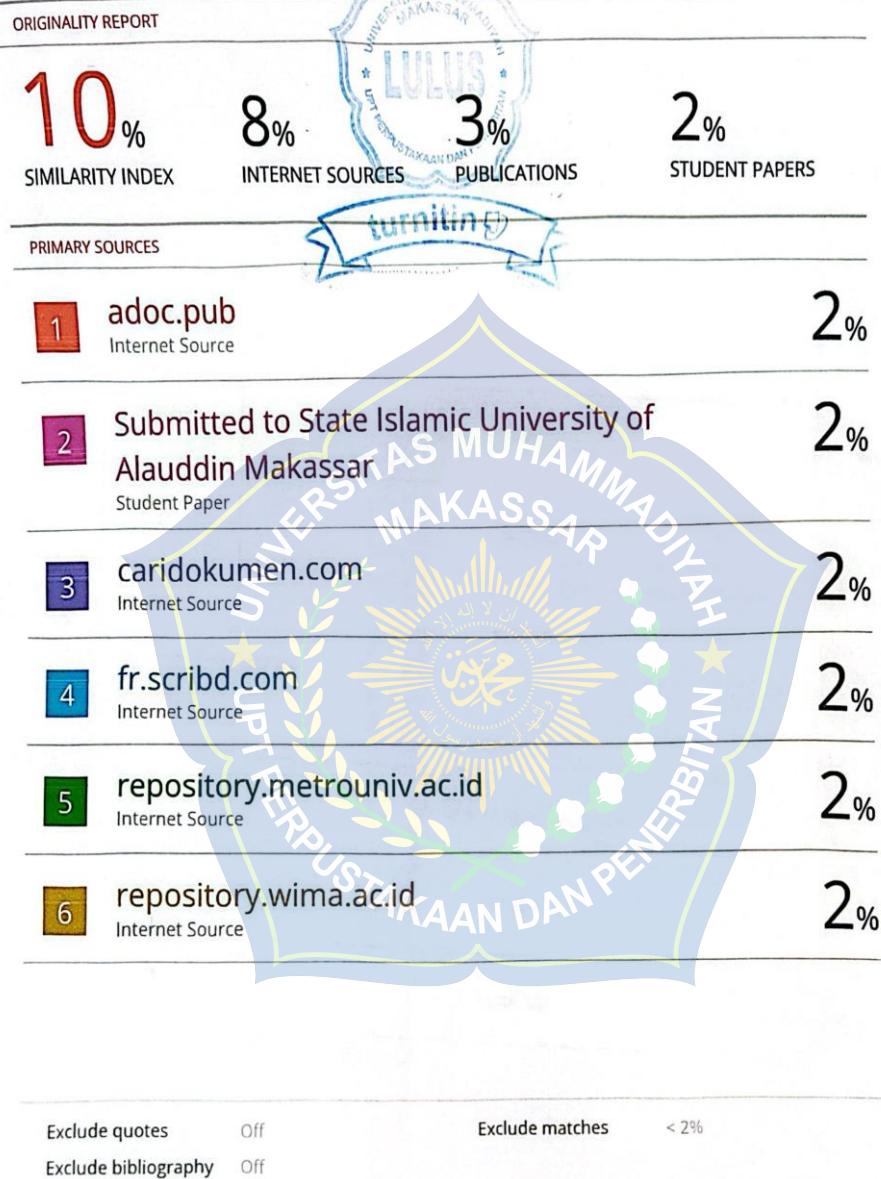


Bab II Risky Ayu Fadilah 105721123121

ORIGINALITY REPORT



Bab III Risky Ayu Fadilah 105721123121



Bab IV Risky Ayu Fadilah 105721123121

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

13%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 dtphp.banggaikab.go.id 5%
Internet Source

2 repository.unibos.ac.id 3%
Internet Source

3 digilib.uinkhas.ac.id 2%
Internet Source

Exclude quotes

Off

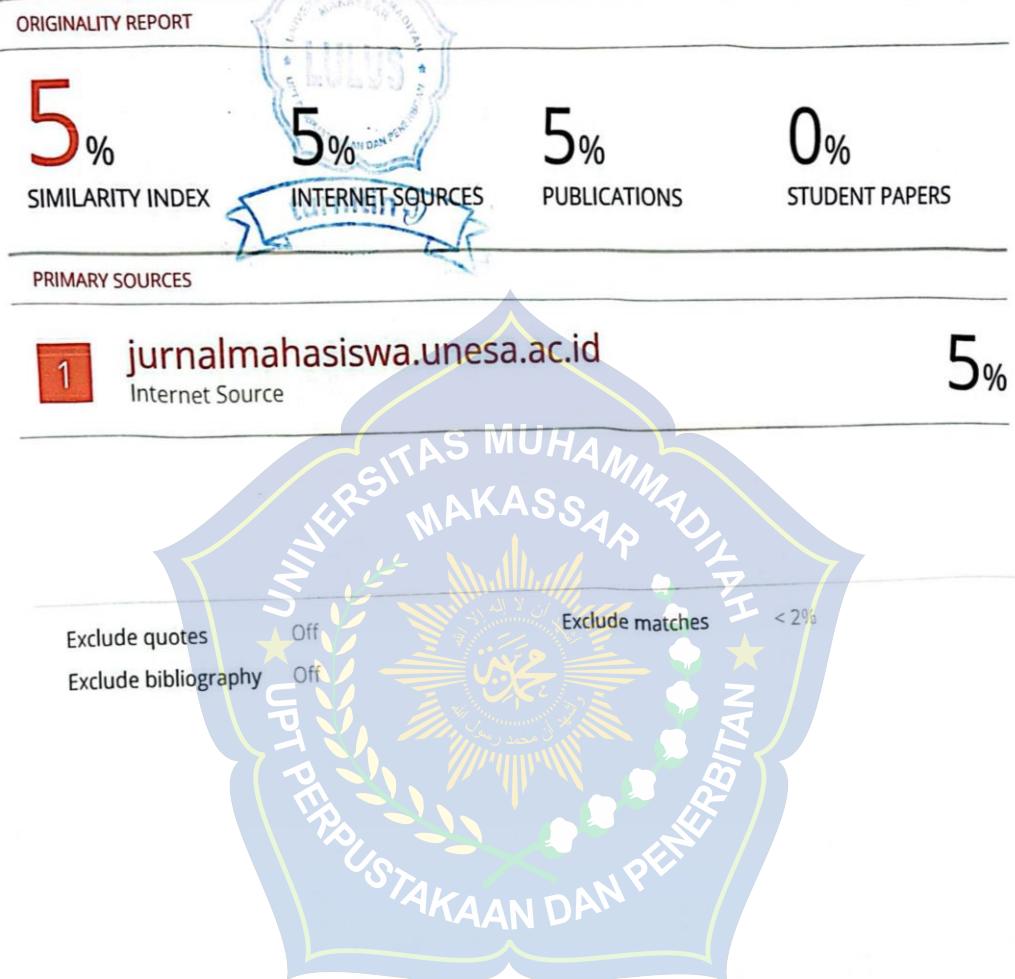
Exclude matches

<2%

Exclude bibliography

Off

Bab V Risky Ayu Fadilah 105721123121





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Risky Ayu Fadilah

Nim : 105721123121

Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 10% | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 18% | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10% | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 10% | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 5% | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 31 Juli 2025
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyiah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

Validasi Data



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI PENELITIAN KUANTITATIF



| NAMA MAHASISWA | RISKY AYU FADILAH | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------------|
| NIM | 105721123121 | | |
| PROGRAM STUDI | MANAJEMEN | | |
| JUDUL SKRIPSI | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG | | |
| NAMA PEMBIMBING 1 | Dr. Rustan, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA., CPA.,ASEAN CPA | | |
| NAMA PEMBIMBING 2 | Safri Haliding, S.E.,M.Sc., ACC | | |
| NAMA VALIDATOR | Dr. Sri Andayaningsih, S.E., M.M | | |
| No | Dokumen | Tanggal Revisi | Uraian Perbaikan/saran |
| 1 | Instrumen Pengumpulan data (data primer) | 05/07/25 | - |
| 2 | Sumber data (data sekunder) | 05/07/25 | Lengkap |
| 3 | Raw data/Tabulasi data (data primer) | 05/07/25 | - |
| 4 | Hasil Statistik deskriptif | 05/07/25 | Lengkap |
| 5 | Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen | 05/07/25 | Lengkap |
| 6 | Hasil Uji Asumsi Statistik | 05/07/25 | - |
| 7 | Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis | 05/07/25 | Analisis kinerja keuangan |
| 8 | Hasil interpretasi data | 05/07/25 | Lengkap |
| 9 | Dokumentasi | 05/07/25 | Lengkap |

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

Validasi Abstrak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI

ABSTRAK

| NAMA MAHASISWA | RISKY AYU FADILAH | | |
|-------------------|---|--------------------|--|
| NIM | 105721123121 | | |
| PROGRAM STUDI | Manajemen | | |
| JUDUL SKRIPSI | Analisis Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang | | |
| NAMA PEMBIMBING 1 | Dr. Rustan | | |
| NAMA PEMBIMBING 2 | Safri Haliding, SE.,M.Acc. | | |
| NAMA VALIDATOR | Aulia, S.I.P., M.Si.M. | | |
| No | Dokumen | Tanggal Revisi/Acc | Uraian Perbaikan/saran |
| 1 | Abstrak | 10/7/2025 | <p>1. Ikuti buku pedoman penulisan KTI FEB Unismuh Makassar yang terbaru</p> <p>2. Konsultasikan dengan pembimbing</p> <p>3. Cantumkan data hasil SPSS</p> <p>4. Gunakan grammarly untuk memperbaiki grammar abstrak bahasa inggris</p> <p>5. Nama pembimbing dalam abstrak, tidak disingkat dan cukup menuliskan nama saja tanpa gelar akademik dan lainnya</p> |

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

BIOGRAFI PENULIS



Risky ayu fadilah lahir di Enrekang pada tanggal 3 Oktober 2002 dari pasangan suami istri bapak Bachtiar dan ibu Nurmiati. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Bossok Jl. Poros Kalosi Baroko Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh Peneliti yaitu SDN 32 Cece lulus tahun 2015, MTsN 2 Enrekang lulus pada tahun 2018, SMKN 1 Enrekang lulus pada tahun 2021, dan mulai tahun 2021 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

